



**KEBIJAKAN PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO  
DALAM PENANGANAN PERISTIWA TSUNAMI ACEH  
TAHUN 2004**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Agus Danugroho  
NIM 160210302063**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
2019**



**KEBIJAKAN PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO  
DALAM PENANGANAN PERISTIWA TSUNAMI ACEH  
TAHUN 2004**

**SKRIPSI**

diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh :

**Agus Danugroho**  
**NIM 160210302063**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
2019**

## PERSEMBAHAN

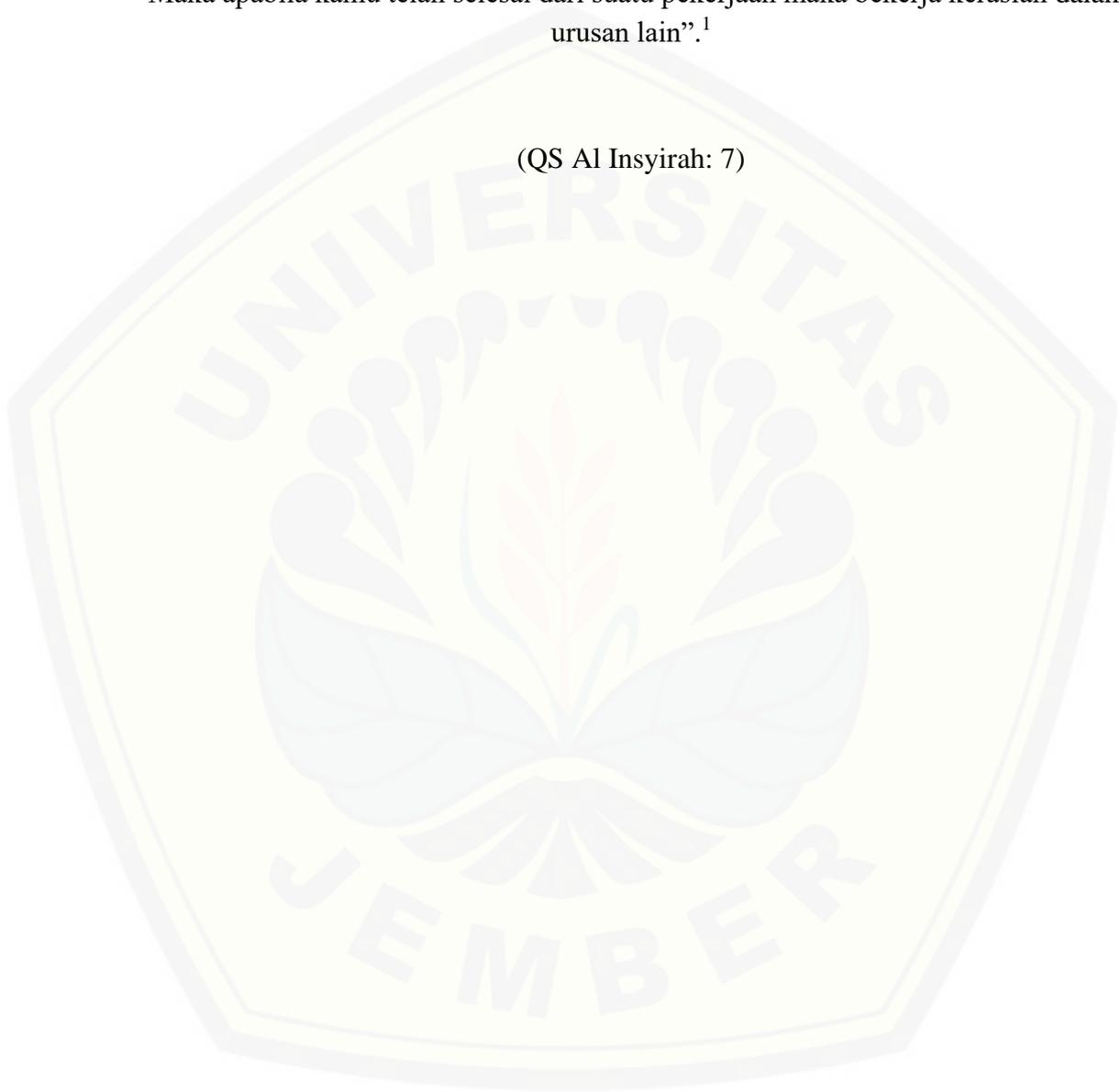
Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibuk Amin Nurhayati dan Bapak Supatmin yang tercinta;
2. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
3. Semua guru TK, SD, SMP, MAN dan dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran;
4. Almamater yang saya banggakan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

**MOTTO**

“Maka apabila kamu telah selesai dari suatu pekerjaan maka bekerja keraslah dalam urusan lain”.<sup>1</sup>

(QS Al Insyirah: 7)



---

<sup>1</sup>Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putera, 1989;86

**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

nama : Agus Danugroho

NIM : 160210302063

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Kebijakan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Penanganan Peristiwa Tsunami Aceh Tahun 2004” benar-benar karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Desember 2019

Yang menyatakan,

(Agus Danugroho)

NIM 160210302063

**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO  
DALAM PENANGANAN PERISTIWA TSUNAMI ACEH  
TAHUN 2004**

Oleh

Agus Danugroho

NIM 160210302063

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Marjono, M. Hum.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Sumardi, M. Hum.

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Kebijakan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Penanganan Peristiwa Tsunami Tahun 2004” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Kamis, 12 Desember 2019

tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Marjono, M. Hum

NIP 196004221988021001

Dr. Sumardi, M. Hum

NIP 196005181989021001

Anggota I,

Anggota II,

Dr. Nurul Umamah, M. Pd

NIP 196902041993032008

Dr. Mohammad Na'im, M. Pd

NIP 196603282000121001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Prof. Drs. Dafik, M. Sc., Ph. D.

NIP 196808021993031004

## RINGKASAN

**Kebijakan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Penanganan Peristiwa Tsunami Aceh Tahun 2004**; Agus Danugroho, 160210302063; 2019: xiv + 88 halaman; Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Peristiwa Tsunami Aceh tahun 2004 merupakan salah satu bencana alam yang statusnya ditetapkan menjadi bencana nasional di Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi ketika Indonesia belum memiliki badan khusus serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanggulangan bencana alam. Tsunami Aceh memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat Indonesia hingga internasional. Menurut data dari BPS tercatat lebih dari 130.013 orang tewas dan 37.066 hilang. Bencana ini juga menghancurkan pemukiman penduduk dan mengharuskan penduduk pesisir Aceh mengungsi. Tercatat lebih dari 500.000 orang harus mengungsi dikarenakan kehilangan tempat tinggal. Tsunami Aceh menyebabkan banyak permasalahan pelik yang harus diselesaikan oleh Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono antara lain, pemerintahan daerah yang tidak dapat berjalan dengan semestinya, Undang-undang penanggulangan bencana belum ada, penolakan terhadap bantuan internasional termasuk militer, dan anggaran APBN yang tidak tersedia untuk tanggap darurat Aceh. Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimanakah upaya dari Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam menangani peristiwa Tsunami Aceh tahun 2004 serta hambatan dan dampak yang ditimbulkannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) apa latar belakang peristiwa Tsunami Aceh tahun 2004 ditetapkan sebagai bencana nasional; (2) bagaimanakah upaya pemerintahan SBY dalam menangani Tsunami Aceh pada tahun 2004; (3) apakah hambatan yang dihadapi pemerintahan SBY dalam penyelesaian Tsunami Aceh tahun 2004; dan (4) bagaimanakah dampak penanganan Tsunami Aceh pada tahun 2004 terhadap Pemerintahan SBY dan rakyat Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan sosiologi politik. Langkah-langkah penelitian yaitu (1) Heuristik yakni pengumpulan sumber-sumber melalui kegiatan studi kepustakaan terkait topik penelitian yang dilakukan, (2) Kritik yakni mengkritik sumber dokumen untuk

memperoleh keabsahan sumber, dengan menyeleksi secara fisik sumber yang telah diperoleh (kritik ekstern) dan mengkritik sumber dengan cara membandingkan informasi satu dengan yang lainnya (kritik intern), (3) Interpretasi yakni menggabungkan fakta-fakta berupa informasi yang didapat sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh, dan (4) Historiografi yakni pemaparan hasil dari interpretasi dengan menuliskan fakta penelitian sejarah yang telah dilaksanakan.

Hasil penelitian adalah (1) Penetapan status bencana nasional peristiwa Tsunami Aceh tahun 2004 ditandai dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2004. Penetapan tersebut mengacu pada beberapa pertimbangan antara lain, korban dan kerugian yang ditimbulkan, pelayanan publik yang tidak dapat berjalan dengan semestinya, dan kondisi APBD Aceh yang tidak mampu untuk melakukan penanggulangan bencana alam. (2) Keluarnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanggulangan bencana alam seperti UU No 24 Tahun 2007, UU No 26 Tahun 2007, UU No 27 Tahun 2007. (3) Terbentuknya badan khusus yang bertugas melaksanakan proses penanggulangan bencana alam yaitu BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). (4) Adanya hambatan kasus korupsi di penanganan Tsunami Aceh yang diselesaikan oleh BRR dengan membentuk SAK (Satuan Anti Korupsi) dan mengadakan CFAN (*Coordination Forum for Aceh and Nias*) guna membentuk kepercayaan lembaga donor kepada BRR.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah (1) latar belakang penetapan status bencana nasional didasarkann 3 faktor yaitu Korban dan kerugian, pelayanan publik yang terhambat, dan kondisi APBD. (2) Pemerintah SBY melakukan 3 upaya penanganan yang terdiri dari Upaya Tahap Tanggap Darurat, Tahap Rehabilitasi, dan Tahap Rekontruksi. (3) Pada saat melakukan upaya penanganan Pemerintahan SBY dihadapkan dengan berbagai hambatan antara lain ketidakpercayaan lembaga donor terhadap BRR dan hambatan dari lapangan yaitu kondisi transportasi, komunikasi, dan informasi. (4) Dampak dari penanganan ada dua, yaitu pertama untuk Pemerintahan SBY berdampak pada pembuatan aturan dan badan-badan khusus yang berguna untuk penanggulangan bencana alam kedepannya. Sedangkan kedua untuk rakyat Aceh adalah perubahan kondisi perekonomian hingga menyebabkan penduduk Aceh migrasi ke luar Aceh.

## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Penanganan Peristiwa Tsunami Aceh Tahun 2004”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M. Sc., Ph. D, selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Drs. Dafik, M. Sc., Ph. D, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Dr. Sumardi, M. Hum, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Jember sekaligus pembimbing anggota;
4. Dr. Nurul Umamah, M. Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jember sekaligus penguji utama dalam penulisan skripsi ini;
5. Drs. Marjono, M. Hum, selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
6. Dr. Mohammad Na'im, M. Pd, selaku penguji anggota yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini;
7. Dosen-dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Jember yang sudah memberikan ilmu, arahan dan bimbingan selama perkuliahan;
8. Ibuk Amin Nurhayati dan Bapak Supatmin yang telah memberikan dorongan dan doanya demi terselesaikannya skripsi ini;
9. Kakak kandung saya Novi Safitri yang telah memberikan acuan semangat secara tidak langsung,
10. Teman gabungan Tokoh Berpengaruh dan SMK 69, teman sedaerah Bojonegoro dalam paguyuban IKMBJ serta teman seperjuangan angkatan 2016 Pendidikan Sejarah yang telah memberikan dorongan dan;

11. semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 12 Desember 2019

Penulis,



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Penegasan Judul .....	5
1.3 Lingkup Penelitian .....	7
1.4 Rumusan Masalah .....	8
1.5 Tujuan Penelitian .....	8
1.6 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>21</b>
<b>BAB 4. LATAR BELAKANG PENETAPAN PERISTIWA TSUNAMI ACEH SEBAGAI BENCANA NASIONAL TAHUN 2004</b> .....	<b>35</b>
4.1 Korban dan Kerugian Tsunami Aceh 2004 .....	35
4.2 Kondisi Pelayanan Publik .....	38
4.3 Kondisi APBD Aceh .....	41
<b>BAB 5. UPAYA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DALAM PENANGANAN TSUNAMI ACEH TAHUN 2004</b> .....	<b>45</b>
5.1 Fase Tanggap Darurat .....	45
5.2 Upaya Rehabilitasi .....	51
5.2.1 Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik .....	51
5.2.2 Penanganan Trauma Korban .....	53

5.3 Upaya Rekontruksi .....	55
5.3.1 Rekontruksi Fisik .....	55
5.3.2 Rekontruksi Non Fisik .....	59
<b>BAB 6. HAMBATAN YANG DIHADAPI PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DALAM PENANGANAN TSUNAMI ACEH TAHUN 2004 .....</b>	<b>63</b>
6.1 Ketidakpercayaan Pihak Asing (Lembaga Donor) Terhadap BRR ..	63
6.2 Hambatan Sarana Transportasi .....	66
<b>BAB 7. DAMPAK PENANGANAN TSUNAMI ACEH TAHUN 2004 TERHADAP PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DAN RAKYAT ACEH .....</b>	<b>69</b>
7.1 Dampak terhadap Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono .....	69
7.2 Kondisi Rakyat Aceh Pasca Rehabilitasi dan Rekontruksi .....	71
<b>BAB 8. PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
8.1 Simpulan .....	74
8.2 Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Matrik Penelitian .....	83
Lampiran 2. Peta Wilayah Yang Terkena Bencana Alam Tsunami Pada Tahun 2004 .	84
Lampiran 3. Gambar-Gambar Kerusakan Pasca Tsunami Aceh Pada Tahun 2004 .....	85



**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Estimasi Kerusakan Berbagai Sektor Akibat Tsunami Aceh Tahun 2004 (dalam satuan Triliun Rupiah) .....	38
Tabel 4.2 Penerimaan Per-capita (APBD) Provinsi dan Kab/Kota, 2004 .....	42
Tabel 5.1 Bantuan Amerika terhadap Indonesia .....	46
Tabel 5.2 Data Pembangunan Sektor Perumahan dan Infrastruktur Dasar pada tahun 2005 sampai 2006 .....	58



## BAB 1. PENDAHULUAN

Pada bab ini dipaparkan hal-hal yang berkaitan dengan pendahuluan yang meliputi; (1) latar belakang; (2) penegasan judul; (3) ruang lingkup penelitian; (4) rumusan masalah; (5) tujuan penelitian; dan (6) manfaat penelitian.

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya akan ditulis SBY) menetapkan prioritas utama dalam kepemimpinannya yaitu pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme atau biasa disebut KKN (Nugroho, 2010:32). Selain prioritas utama tersebut program-program yang dicanangkan selama periode pemerintahan SBY antara lain, penanggulangan perubahan iklim dan lingkungan, kesiapsiagaan menanggulangi bencana alam, serta meningkatkan produksi dan ketahanan pangan. Dari setiap program pemerintahan SBY yang bisa langsung ditagih oleh bangsa Indonesia adalah program kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam. Beberapa bulan setelah dilantik sebagai Presiden Indonesia pada bulan Desember terjadi bencana alam Tsunami yang terjadi di Aceh. Menurut data dari BPS tercatat sekitar 130.013 orang tewas dan 37.066 orang hilang. Bencana ini juga menghancurkan pemukiman penduduk sehingga banyak penduduk kehilangan tempat tinggal dan mengungsi. Dari sekitar 500.000 pengungsi sebagian besar anak-anak, perempuan, dan orang-orang tua. Selain dampak fisik, bencana ini memberikan dampak psikologis yang menyebabkan trauma berkepanjangan (BPS, 2005).

Tsunami Aceh menyebabkan banyak persoalan pelik yang harus dipecahkan oleh pemerintahan SBY. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain, pemerintahan daerah benar-benar tidak berjalan dengan semestinya, logistik tidak ada, konflik bersenjata dengan GAM yang masih berlangsung, ada penolakan terhadap bantuan internasional, termasuk militer, badan penanggulangan bencana belum terbentuk, Undang-undang penanggulangan bencana belum ada, dan anggaran APBN tahun 2004 tidak tersedia untuk tanggap darurat Tsunami Aceh (detikNews, 2014).

SBY dari permasalahan diatas mengambil kebijakan yang tujuannya untuk memastikan bahwa semua bentuk operasi tanggap darurat harus dapat dilakukan secepatnya termasuk kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi setelah tanggap darurat selesai dilakukan. Ada 4 (empat) persoalan kritical yang memerlukan keterlibatan dan keputusan dari SBY selaku Presiden secara langsung. Permasalahan itu antara lain, pertama adalah penggunaan APBN untuk operasi tanggap darurat, kedua kebijakan terhadap bantuan internasional, selanjutnya kehadiran dan pelibatan militer asing dalam operasi tanggap darurat dan yang terakhir adalah tindakan penghentian operasi militer dalam menghadapi Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Pemerintah SBY menyusun tiga tahapan pemulihan kondisi daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terkena bencana alam Tsunami (Tempo, 2004). Pemulihan daerah tersebut diperkirakan membutuhkan waktu lima tahun. Tiga tahapan pemulihan itu dihasilkan dari rapat sidang kabinet paripurna. Pada sidang kabinet paripurna agenda tunggal dalam sidang tersebut yaitu penyusunan langkah-langkah lanjutan penanggulangan bencana di Aceh dan Sumatera Utara.

Pemerintah telah menetapkan langkah-langkah penanganan dan pemulihan kondisi Aceh. Langkah-langkah dan tahapan itu disusun secara sistematis dan dikelola dengan baik sesuai dengan target waktu penyelesaiannya. Penyusunan langkah-langkah dan tahapan itu berdasarkan hasil kajian Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi. Presiden SBY menyatakan ada tiga tahap proses pemulihan Aceh. Pertama, adalah tahapan kedaruratan (*emergency*) yang diperkirakan memakan waktu selama satu tahun (Desember 2004 sampai Desember 2005). Tahap ini dapat dikatakan tahap awal pemulihan wlayah aceh yang meliputi pengadaan makanan, pakaian, pelayanan kesehatan, tempat tinggal sementara, air bersih, dan tenaga sosial. Bersamaan dengan itu pemerintah juga menggelar tahap kedua yaitu rehabilitasi Aceh selama satu tahun lebih. Dan tahap ketiga adalah program rekontruksi yaitu membangun kembali infrastrukstur, pelayanan publik dan rumah-rumah masyarakat. Tahap ini dimulai pada pertengahan tahun 2005 sampai tahun 2009 (BRR, 2005).

Pemerintah SBY dalam penyelesaian permasalahan yang ada dan untuk menanggulangi bencana alam Tsunami Aceh mengambil langkah-langkah kebijakan seperti, menyatakan Bencana di Aceh sebagai bencana nasional yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 112 tahun 2004, memobilisasi sumber daya nasional dan daerah untuk upaya-upaya penanganan darurat dan mengembalikan fungsi Pemerintahan Daerah yang tidak berjalan karena terkena Tsunami Aceh (Keppres, 2004).

Presiden SBY setelah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 112 tahun 2004 selanjutnya mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kegiatan Tanggap Darurat dan Perencanaan serta Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Setelah keluarnya instruksi Presiden tersebut, Wakil Gubernur NAD (Nanggroe Aceh Darussalam) langsung mengkoordinasikan dan mengendalikan penanggulangan bencana sampai dibentuk Satuan Koordinasi Pelaksana Khusus Aceh dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Bakornas PBP Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 30 Desember 2004. Satkorlak ini diketuai oleh Wakil Presiden dan Menko Kesra selaku Ketua Pelaksana Harian dan Wakil Gubernur NAD sebagai Pelaksana di tingkat Provinsi (Inpress, 2005).

Pemerintah Pusat guna memperkuat Satkorlak PBP di Provinsi NAD mengingat dampak yang ditimbulkan Tsunami Aceh sangat luas. Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 3 Tahun 2005 tanggal 18 Januari 2005 yang menempatkan Menko Kesra sebagai ketua Satkorlak Khusus, Wakasad sebagai Wakil Ketua I dan Wakil Gubernur NAD sebagai Wakil Ketua II yang khusus mengkoordinasikan pemulihan fungsi pemerintahan. Secara operasional, kegiatan tanggap darurat diarahkan pada kegiatan: (a) evakuasi dan pemakaman jenazah korban, (b) penanganan pengungsi, (c) pemberian bantuan darurat, (d) pelayanan kesehatan, sanitasi dan air bersih, (e) pembersihan kota, dan (f) penyiapan hunian sementara (Perpres Nomor 30, 2005).

Koordinasi pelaksanaan kegiatan tanggap darurat dilakukan melalui mekanisme komando (Posko) yang terdiri dari: (a) Posko Nasional Bakornas PBP di Kantor Wakil Presiden, (b) Posko Utama Satkorlak Khusus di Banda Aceh,

Posko Pendukung Logistik di Medan, Batam dan Sabang, dan (c) Posko Satlak Khusus (Satlaksus) di tiga wilayah, yaitu: Satlaksus I di Lhokseumawe, Satlaksus II di Banda Aceh, dan Satlaksus III di Meulaboh. Pos-pos komando itu diharapkan memperlancar pelaksanaan bantuan tanggap darurat sesuai dengan tanggung jawab masing-masing instansi. Namun bagaimana pelaksanaannya, sesuaikah dengan juklak atau petunjuk pelaksanaan sehingga bisa mempengaruhi keberhasilan dalam operasi tanggap darurat bencana alam Tsunami di Aceh.

Uraian diatas sebagai awal ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian mengenai penanganan Tsunami Aceh oleh pemerintahan SBY. Penulis sangat tertarik membahas mengenai bagaimana pemerintahan SBY dalam menangani peristiwa bencana alam Tsunami Aceh. Alasan pertama, Tsunami Aceh adalah bencana alam terbesar yang terjadi pada masa pemerintahan SBY. Kondisi Aceh saat terjadinya Tsunami masih diliputi suasana konflik yang belum terselesaikan. Selain itu, pasca terjadinya Tsunami Aceh banyak muncul masalah baru yang harus segera diselesaikan dalam penanganan bencana Tsunami Aceh. Alasan kedua, penanganan bencana alam Tsunami Aceh oleh Pemerintahan SBY masih belum ada yang membahas atau meneliti. Sehingga penulis memanfaatkan kesempatan ini untuk mengkaji secara mendalam mengenai penanganan bencana alam Tsunami Aceh pada tahun 2004 oleh Pemerintahan SBY dan menuangkannya dalam bentuk tulisan karya ilmiah.

Penelitian ini dianggap penting karena Tsunami Aceh mempunyai dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia. Tsunami Aceh seperti yang sudah dijelaskan diatas, ditetapkan oleh Presiden SBY menjadi Bencana Nasional. Bencana alam yang ditetapkan menjadi sebuah Bencana Nasional pasti membutuhkan penanganan yang serius dari Pemerintah pusat. Dalam hal ini peran pemerintahan SBY sangat penting bagi korban bencana alam. Penanganan Tsunami Aceh bisa sebagai pembuktian langkah awal pemerintahan SBY dalam menangani krisis. Seberapa besar pemerintahan SBY mampu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul akibat peristiwa Tsunami di Aceh pada tahun 2004.

Tulisan ini juga penting untuk pembelajaran sejarah guna upaya membentuk karakter siswa yang siap siaga akan bencana alam. Pendidikan dapat memberikan

pengetahuan dan keterampilan siswa dalam menghadapi bencana alam. Berdasarkan kasus bencana alam yang rawan terjadi di Indonesia, perlu adanya strategi yang pragmatis dalam membentuk masyarakat Indonesia yang sadar akan bahaya bencana alam. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melalui sektor pendidikan. Melalui pembelajaran, guru dapat mengajarkan pengetahuan tentang mitigasi bencana secara intensif. Jadi penanganan peristiwa Tsunami Aceh tahun 2004 yang dilakukan pemerintahan SBY dapat dijadikan materi untuk pembelajaran sejarah dan sekaligus memberikan dampak membentuk karakter siswa siap siaga. Pendidikan mitigasi bencana yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran sejarah mampu membentuk karakter siswa siap siaga bencana. Sehingga secara tidak langsung siswa dapat mempelajari tentang materi mitigasi bencana. Oleh karena itu, peneliti menganggap tulisan mengenai kebijakan Pemerintahan SBY dalam menangani Tsunami Aceh penting untuk diungkapkan agar mencapai kajian sejarah ilmiah dan menambah pengetahuan dalam historiografi nasional kontemporer. Maka peneliti memilih judul **“Kebijakan Pemerintahan SBY Dalam Penanganan Tsunami Aceh Tahun 2004”**.

## 1.2 Penegasan Judul

Penegasan judul ini dibuat untuk memperjelas dan supaya tidak terjadi kesalahpahaman serta mendapatkan gambaran yang jelas mengenai judul “Kebijakan Pemerintahan Presiden SBY dalam Penanganan Peristiwa Tsunami Aceh Pada Tahun 2004”, maka penulis perlu memberikan penegasan dari istilah yang terdapat dalam judul yang dibuat.

Pengertian kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atau atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Easton (dalam Abidin, 2012:6) menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Pengertian kebijakan pemerintah sama dengan kebijaksanaan berbagai bentuk seperti misalnya jika dilakukan oleh Pemerintah Pusat berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (Kepmen) dan lain-lain. Sedangkan jika kebijakan pemerintah tersebut dibuat oleh Pemerintah Daerah akan melahirkan Surat Keputusan (SK), Peraturan Daerah (Perda) dan lain-lain.

Kebijakan pemerintah dalam penegasan judul ini adalah keputusan yang diambil pemerintahan Presiden SBY dalam penanganan bencana alam Tsunami Aceh pada tahun 2004.

Penanganan adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman dari bahaya yang terjadi. Penanganan yang dimaksud dalam penegasan judul ini adalah kegiatan penanganan bencana alam yang bisa disebut penanggulangan atau mitigasi. Penanggulangan bencana alam dapat dilakukan melalui a) pelaksanaan penataan ruang; b) pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan c) penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern (UU Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 47 ayat 2 tentang Penanggulangan Bencana). Penanggulangan bencana alam dalam hal ini adalah penanggulangan bencana alam dalam bentuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Tsunami Aceh pada tahun 2004.

Pada tanggal 26 Desember 2004 di Samudera Hindia telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 9,1 Richter tepatnya di barat daya pantai Sumatera. Gempa bumi ini kemudian mengakibatkan munculnya gelombang Tsunami yang kemudian menjalar ke berbagai wilayah seperti, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pulau Nias, kawasan Khao Lak di Thailand dan sebagian besar Sri Lanka. Indonesia merupakan negara yang paling parah terkena dampak dari bencana Gempa Bumi dan Tsunami ini, dimana hasil dari laporan resmi dari Lembaga Informasi Negara berkooordinasi dengan Satkorlak Bencana Gempa dan Tsunami di Banda Aceh, Tsunami Aceh menelan korban jiwa yang meninggal sebanyak 83.423 orang, korban tidak ditemukan sejumlah 6.841 orang, tsunami juga mengakibatkan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan menjadi pengungsi di Aceh sebesar 370.679 orang (Subiyantoro, 2004).

Jadi maksud dari penegasan judul **“Kebijakan Pemerintahan Presiden SBY Dalam Penanganan Peristiwa Tsunami Aceh Tahun 2004”** ialah penerapan kebijakan pemerintahan SBY dalam menangani bencana alam Tsunami Aceh dengan merehabilitasi dan merekonstruksi kerusakan-kerusakan, mengatasi hambatan serta dampak yang ditimbulkannya di Aceh pada tahun 2004. Upaya

rehabilitasi dan rekontruksi yang dilaksanakan di Aceh akan ditinjau secara mendalam dengan sudut pandang historis. Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi pastilah mempunyai hambatan dalam berbagai hal. Hambatan serta penanganan yang dilakukan oleh Pemerintahan SBY akan menjadi hal menarik untuk dikaji. Setelah segala proses rehabilitasi dan rekontruksi dilaksanakan, hasil dari upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah akan mempunyai dampak yang signifikan untuk Pemerintahan dan khususnya dampak untuk korban yaitu rakyat Aceh.

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ditujukan untuk menghindari penyimpangan kajian penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Ruang lingkup yang dimaksud meliputi lingkup temporal, spasial dan materi.

Ruang lingkup waktu (temporal) penelitian ini adalah pada tahun 2004. Pembahasan dimulai sejak terjadinya Tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Perlu diperhatikan bahwa penanganan masalah Tsunami oleh Pemerintahan SBY berlangsung sampai tahun 2005. Selanjutnya pada proses rekontruksi dan rehabilitasi dilaksanakan sampai tahun 2009 oleh Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah dengan bantuan pemerintahan daerah dan badan ataupun instansi yang lainnya. Penelitian ini membahas penanganan Pemerintahan SBY dari penetapan status bencana nasional hingga proses rekontruksi berakhir dan diserahkan kepada pemerintahan daerah setempat.

Lingkup spasial yang diambil dalam penulisan skripsi ini adalah wilayah pesisir Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terkena dampak peristiwa tsunami. Sedangkan ruang lingkup materi pada penelitian ini adalah latar belakang penetapan status bencana alam Tsunami Aceh tahun 2004 sebagai bencana nasional, upaya-upaya pemerintahan SBY dalam penanganan bencana alam Tsunami Aceh tahun 2004, Hambatan-hambatan yang dihadapi pada saat penanganan Tsunami Aceh tahun 2004, dan juga dampak dari penanganan Tsunami Aceh tahun 2004 terhadap Pemerintahan SBY dan rakyat Aceh.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan ruang lingkup permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apa latar belakang penetapan peristiwa Tsunami Aceh tahun 2004 ditetapkan menjadi bencana nasional?
- 2) Bagaimanakah upaya pemerintahan SBY dalam menangani Tsunami Aceh pada tahun 2004?
- 3) Apakah hambatan yang dihadapi pemerintahan SBY dalam penanganan Tsunami Aceh tahun 2004?
- 4) Bagaimanakah dampak penanganan Tsunami Aceh pada tahun 2004 terhadap Pemerintahan SBY dan rakyat Aceh?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

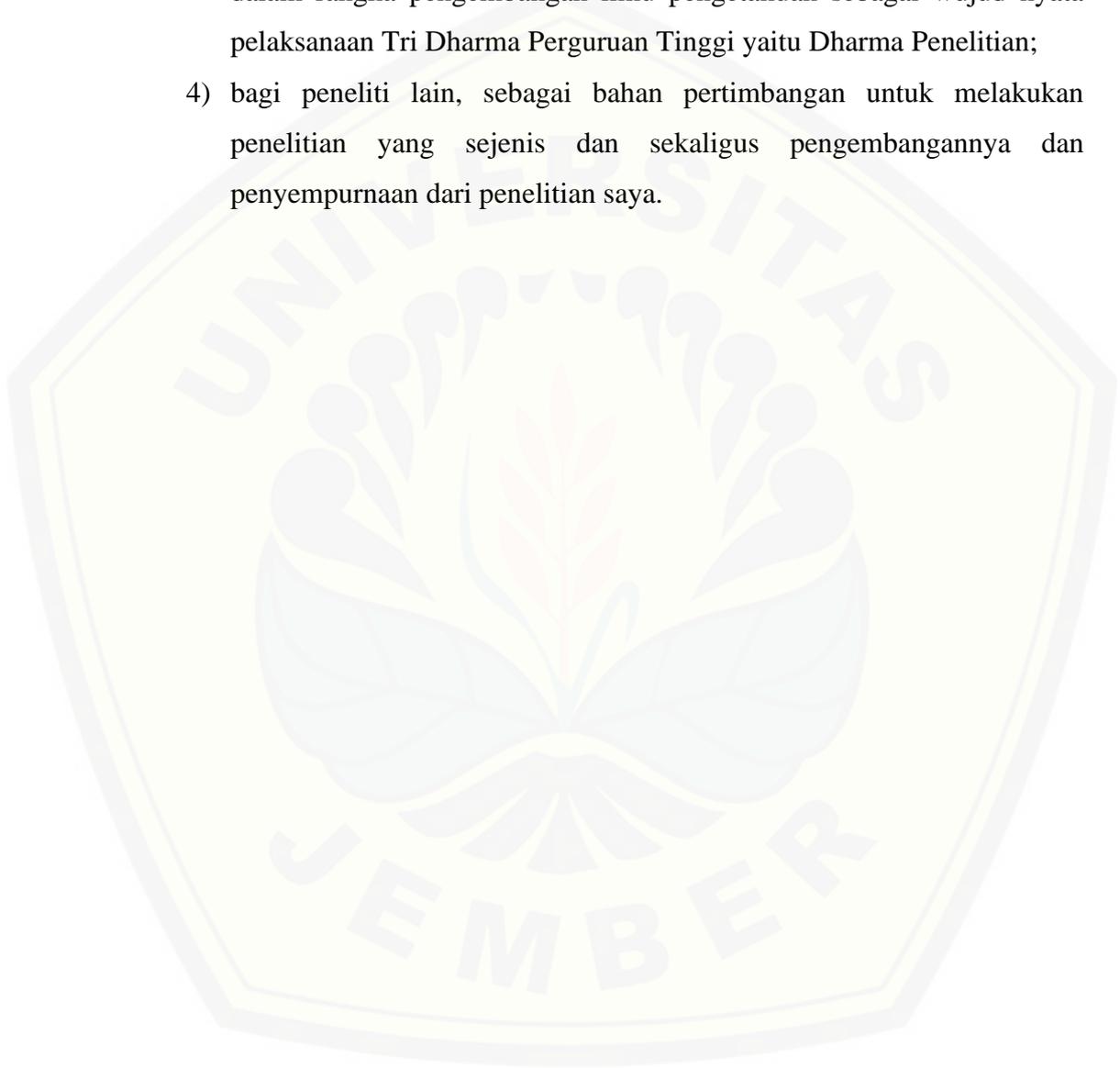
- 1) Untuk menganalisis bagaimanakah latar belakang status bencana alam Tsunami Aceh tahun 2004 ditetapkan menjadi bencana nasional.
- 2) Untuk menganalisis upaya penanganan pemerintahan SBY terhadap Tsunami Aceh tahun 2004.
- 3) Untuk menganalisis hambatan apa saja yang dihadapi oleh pemerintahan SBY saat menangani Tsunami Aceh tahun 2004.
- 4) Untuk menganalisis bagaimanakah dampak penanganan Tsunami Aceh tahun 2004 terhadap Pemerintahan SBY dan rakyat Aceh.

#### 1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait, yakni:

- 1) bagi peneliti, sebagai latihan dalam penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah, latihan berfikir dan memecahkan masalah secara kritis dan logis, serta memperdalam pengetahuan tentang kebijakan pemerintahan SBY dalam penanganan peristiwa Tsunami Aceh tahun 2004,

- 2) bagi mahasiswa pendidikan sejarah, dapat menambah pengetahuan tentang kebijakan Pemerintahan SBY dalam penanganan peristiwa Tsunami Aceh pada tahun 2004;
- 3) bagi almamater, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian;
- 4) bagi peneliti lain, sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian yang sejenis dan sekaligus pengembangannya dan penyempurnaan dari penelitian saya.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka mengemukakan hasil penelitian terdahulu yang mendukung dan berkaitan dengan pembahasan yang akan menjadi fokus kajian penulis yaitu tentang “Kebijakan Pemerintahan SBY dalam Penanganan Peristiwa Tsunami Aceh tahun 2004”. Tinjauan pustaka merupakan sebuah pembahasan yang lebih menekankan pada upaya memposisikan penelitian yang akan dilakukan dibandingkan dengan hasil-hasil terdahulu mencapai tema yang sama. Tinjauan pustaka juga mengemukakan pendekatan dan teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Berbagai kajian tentang teori, pendekatan dan penelitian terdahulu diperoleh dari sumber-sumber berupa buku, jurnal penelitian dan skripsi.

Penelitian yang dilakukan Nazamuddin (2007) yang berjudul “*Kebijakan Ekonomi Untuk Mitigasi Bencana Dan Pemulihan Pasca bencana: Pelajaran Dari Bencana Tsunami di Aceh*”. Dalam tulisan ini ditujukan untuk menganalisis kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam bidang belanja publik untuk mitigasi dan pemulihan pascabencana tsunami di Aceh. Pelajaran-pelajaran apa yang dapat dipetik, baik untuk pengembangan penelitian di bidang ekonomi bencana (*the economics of disasters*) maupun untuk pengambilan kebijakan untuk mengurangi resiko kerugian akibat bencana di masa depan.

Analisis deskriptif terhadap pengalaman kebijakan pemerintah terhadap Aceh digunakan dan hasilnya diharapkan dapat mengarahkan kebijakan belanja publik terhadap mitigasi dan penanganan pascabencana di daerah lain. Kebijakan belanja publik untuk mitigasi bencana dan pemulihan pascabencana besar berada pada dua pilihan sulit. Satu alternatif adalah mengeluarkan belanja publik yang besar tanpa manfaat yang dapat dirasakan segera dan adanya ketidakpastian (*uncertainty*) terjadinya bencana di masa depan, tapi dapat mencegah kerugian yang besar jika bencana terjadi. Alternatif lain adalah menghemat belanja publik sekarang sehingga dapat dimanfaatkan untuk pelayanan yang dapat dinikmati segera, tapi dengan resiko kerugian yang besar jika bencana terjadi tanpa mitigasi yang memadai (Nazamuddin, 2007: 1-19).

Penelitian terdahulu ini lebih memfokuskan bagaimana kebijakan pemerintah menggunakan APBN atau anggaran belanja dalam penanganan bencana alam pasca Tsunami Aceh, sehingga peneliti mencari celah dari penelitian terdahulu tersebut dengan mengkaji lebih dalam kebijakan pemerintahan SBY dalam menangani Tsunami Aceh pada tahun 2004. Dimana peneliti membahas dan memfokuskan penelitian tentang upaya-upaya pemerintahan SBY yang dimana upaya tersebut mencakup upaya rekonstruksi dan rehabilitasi serta hambatan dari upaya penanganan bahkan hingga efek atau dampak dari upaya penanganan tersebut.

Penelitian yang dilakukan Ardi Adji (2011) yang berjudul “*Social Economic Integration in Aceh: Prior-Post Tsunami*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keterkaitan sosial ekonomi antar-region, yaitu penjelasan kondisi keterkaitan intra-antar-regional di Provinsi Aceh sebelum dan selama masa rekonstruksi dan rehabilitasi pascatsunami. Kehancuran sosial ekonomi yang disebabkan oleh gempa bumi dan tsunami membawa dampak yang besar bagi kesejahteraan Aceh. Berdasarkan fakta tersebut, sangat penting untuk mengamati dan mengukur perkembangan sosial ekonomi antar wilayah sebagai dampak pembangunan infrastruktur dan integrasi sosial ekonomi yang fokus pada tiga wilayah utama di Aceh, yaitu Ladiagalasska (Lautan Hindia, Gayo Alas Singkil, dan Selat Malaka). Selain itu, masing-masing daerah secara signifikan memiliki efek yang berbeda. Metodologi penelitian menerapkan model *Multiregional Input-Output* (MRIO) Aceh 2002 dan 2006 dan analisis deskriptif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardi Adji (2011) disimpulkan terjadi peningkatan integrasi sosial antar-region di Aceh, sosial integrasi terbesar di region Lautan Hindia, kemudian diikuti region Selat Malaka dan region Gayo Alas Singkil. Integrasi ekonomi Aceh pasca-bencana Gempa Bumi dan Tsunami telah menurun. Hal ini menunjukkan penurunan perdagangan di antara wilayah lain, tapi intraregion perdagangan meningkat. Sementara kondisi perdagangan antar wilayah Aceh meningkat secara signifikan kecuali kawasan Samudra Hindia. Hal ini menunjukkan bahwa barang dan jasa yang diperlukan dalam rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh diperoleh dari ROI, terutama Provinsi Sumatra Utara.

Peningkatan integrasi sosial antar-region setelah tsunami tidak diikuti oleh peningkatan integrasi ekonomi karena pengaruh integrasi sosial tidak secepat integrasi ekonomi sehingga peningkatan integrasi sosial dapat dijadikan modal dasar dalam Peningkatan integrasi ekonomi di masa yang akan datang karena dapat membuka interaksi antar-region yang lebih baik (Adji, 2011).

Penelitian terdahulu ini lebih banyak menjelaskan dalam penelitiannya pada aspek perkembangan sosial ekonomi antarwilayah sebagai dampak pembangunan infrastruktur. Walaupun dalam pemaparannya menjelaskan mengenai rekonstruksi dan rehabilitasi akan tetapi pembahasan dan fokus dari tulisan terdahulu ini lebih mengarah ke dampak untuk aspek integrasi ekonomi dan sosial pasca Tsunami Aceh. Oleh karena itu peneliti disini mengambil celah dari tulisan ini yaitu mengkaji dampak dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena Tsunami pada tahun 2004 untuk pemerintahan SBY dan juga untuk rakyat Aceh khususnya yang terkena dampak Tsunami Aceh tahun 2004.

Penelitian yang dilakukan Ryo Matsumaru, K. Nagami, K. Takeya (2012) berjudul "*Reconstruction of the Aceh Region following the 2004 Indian Ocean tsunami disaster: A transportation perspective*". Dalam jurnal ini membahas mengenai bagaimana pemulihan atau rekonstruksi wilayah aceh dalam segi fokus transportasi. Transportasi adalah salah satu hal yang terpenting dalam pembangunan infrastruktur, terlebih lagi mengenai relokasi wilayah bencana alam. Untuk menghidupkan lagi wilayah tersebut sangat diperlukan pembangunan dari beberapa segi termasuk dalam segi transportasi.

Hasil dari penelitian yang dilakukan Matsumaru, Nagami, Takeya (2012) membahas rekonstruksi dalam hal Transportasi pasca Tsunami Aceh. Dalam pembahasannya diantaranya, rekonstruksi jaringan jalan di wilayah pesisir Banda Aceh, relokasi perumahan dan mobilitas penduduk pasca Tsunami, serta efek dari rekonstruksi. Rekonstruksi jaringan jalan di wilayah pesisir Banda Aceh. Jaringan jalan di wilayah pesisir Banda Aceh rusak parah akibat tsunami. Setelah bencana, dengan meninjau rencana tata ruang Banda Aceh, sebuah rencana induk rekonstruksi yang mencakup rencana jaringan jalan dirumuskan. Dalam master plan, jaringan jalan yang diusulkan mengikuti yang ada sebelum tsunami, dengan

beberapa jalan yang ditetapkan sebagai jalur pelarian tsunami karena perumahan telah diizinkan di daerah pesisir yang terkena dampak tsunami. Bagian ini menguraikan proses perencanaan rekonstruksi yang merupakan dasar untuk memahami rencana jaringan jalan dan kemudian mengevaluasi jaringan jalan di wilayah pesisir dari perspektif manajemen bencana tsunami. Perumusan rencana rekonstruksi perkotaan untuk membangun kota yang aman dari tsunami dimulai segera setelah bencana (Matsumaru, 2012: 11-19).

Penelitian yang dilakukan Matsumaru, Nagami, Takeya (2012) menunjukkan pembangunan kembali Aceh pasca tsunami memang sangat dipercepat, mengingat tsunami yang menimpa Aceh sangat besar hingga Aceh lumpuh total. Kebijakan pemerintahan yang salah satunya dalam bidang infrastruktur adalah dengan segera membenahi infrastruktur dan jalan yang rusak agar bantuan yang datang dari luar ke Aceh bisa disalurkan dengan cepat dan juga jalan-jalan yang rusak bahkan bisa dikatakan tidak berbentuk jalan lagi. Pemerintah segera mengadakan rapat darurat dan segera membangun sedikit demi sedikit jalan yang sekiranya penting untuk alur penghubung satu lokasi pengungsian ke lokasi pengungsian yang lain. Pada penelitian terdahulu ini memiliki persamaan pembahasan yaitu rekonstruksi wilayah Aceh pasca Tsunami pada tahun 2004. Akan tetapi dalam penelitian terdahulu ini memfokuskan penelitiannya pada perspektif transportasi dan belum memaparkan kebijakan rekonstruksi secara keseluruhan, oleh karena itu penelitian ini akan lebih memfokuskan penelitian pada kebijakan pemerintahan SBY dalam penanganan Tsunami Aceh pada tahun 2004 dalam upaya rekonstruksi wilayah Aceh dan juga dalam aspek infrastruktur, tempat tinggal, dan lainnya yang berhubungan dengan rekonstruksi Tsunami Aceh pada tahun 2004.

Penelitian dari Maradi, Wirananta, dan Parameswari yang berjudul *“Peranan Australia Dalam Pembangunan Aceh Pasca Bencana Tsunami Melalui Kerangka Kerjasama AIPRD (Australia-Indonesia Partnership For Reconstruction And Development Periode 2005-2009)”*. Dalam jurnal ini memfokuskan penelitian ke dalam bidang pembangunan pasca Tsunami Aceh. Saat ini, pembangunan adalah salah satu aspek penting dan telah menjadi agenda internasional. Pada tahun 2004, Indonesia dilanda tsunami yang menyebabkan kerusakan pada berbagai aspek

kehidupan di Aceh, hal itu tentunya akan menghambat pembangunan di Indonesia. Bencana ini menarik simpati dari negara lain untuk membantu Indonesia dalam rekonstruksi Aceh pasca tsunami. Salah satunya adalah Australia dengan agensi pengembangannya AusAID (*Australian Agency for International Development*). AusAID sebagai badan pembangunan pemerintah Australia yang berperan dalam pembangunan internasional. AusAID sebagai agen pembangunan Australia telah memberikan ODA (*Official Development Assistance*) secara bilateral ke Indonesia. Bantuan tersebut kemudian membentuk kemitraan AIPRD (*Australia-Indonesia Partnership for Reconstruction and Development*) yang ditujukan untuk pengembangan dan rekonstruksi Aceh setelah bencana. Bantuan ini didistribusikan untuk mengembangkan semua sektor seperti pendidikan, kesehatan, pemerintahan, mata pencaharian, perumahan dan infrastruktur. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan peran Australia dalam proses pembangunan dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami melalui program AIPRD pada tahun 2005-2009 (Maradi, etc, 2015).

Hasil penelitian yang dilakukan Maradi, Wirananta, dan Parameswari, disimpulkan bahwa Peranan Australia adalah sebagai fasilitator yang berfungsi sebagai aktor yang membangun segala infrastruktur dan perumahan. Peranan governance and coordination yang berfungsi memfasilitasi kegiatan dalam hal koordinasi untuk mencapai tujuan strategi pembangunan dan mengatasi kesenjangan yang ada antara pihak swasta dan publik. Ada pula leadership roles yakni seluruh bentuk dari berfungsi untuk mendorong dan menyusun strategi rencana jangka panjang dan visi pembangunan di Indonesia khususnya Aceh. Terdapat juga capacity building atau terkait dengan fungsi pengembangan kapasitas masyarakat dengan memberikan pelatihan terkait skill atau kemampuan masyarakat, dan juga terdapat implementation roles yakni segala bentuk peranan dari skill tim kerja Australia yang menonjol dalam mencapai strategi pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat Aceh. Terakhir *Economic Roles* yakni Australia berfungsi sebagai aktor yang menciptakan kegiatan perekonomian dengan membangun asset-aset tertentu. Penelitian terdahulu ini digunakan sebagai bahan tinjauan pustaka karena memiliki kesaamaan dengan topik penelitian yang penulis

kaji. Penelitian terdahulu ini lebih memfokuskan penelitiannya kepada aspek hubungan bilateral Australia-Indonesia dalam penanganan rekontruksi wilayah Aceh pasca Tsunami Aceh tahun 2004. Sedangkan pada rekontruksi wilayah tidak hanya pada aspek hubungan kerja sama bilateral, banyak aspek lain yang dilakukan pemerintahan pada upaya rekontruksi wilayah Aceh yang terkena dampak Tsunami. Oleh karena itu, ini dapat menjadi kesempatan untuk peneliti guna meneliti lebih jauh aspek-aspek dalam upaya rekontruksi yang dilakukan oleh pemerintahan SBY dalam menangani Tsunami Aceh pada tahun 2004.

Penelitian yang terakhir yang dilakukan oleh Haryadi (2015) yang berjudul “*Climate Changes Mitigation Policy of Forestry Sector for Middle Term Development Planning 2015-2019 in the Provinces of Papua and Aceh*”. Dalam jurnal ini membahas bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mitigasi bencana alam. Salah satunya di sektor kehutanan yang dimana dalam sektor ini kebijakan mitigasi dalam sektor kehutanan sangat berpengaruh dalam mitigasi bencana alam. Sebagai pemilik hutan tropis yang luas meskipun pada saat yang sama juga masih harus dihadapkan pada upaya mengatasi merosotnya sumber daya kehutanan, upaya-upaya mitigasi sektor kehutanan di Indonesia memiliki arti yang sangat strategis menyongsong pelaksanaan agenda RPJMN 2015-2019. Bagi pemerintah, upaya ini semua menjadi semakin strategis seiring dengan lemahnya implementasi tata kelola sektor kehutanan seperti diindikasikan dengan masih tingginya deforestasi dan degradasi hutan, kebakaran hutan, konflik kepemilikan lahan dan perubahan alih fungsi lahan dan hutan. Arti pentingnya hal ini tidak hanya terkait dengan lemahnya pengelolaan hutan selama ini tetapi juga bagaimana serangkaian kebijakan kehutanan dalam jangka menengah dapat dikawal secara berkesinambungan. Implementasi kebijakan mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan sangat akan terkait dengan peran daerah. Oleh karena itu, menempatkan mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan dalam RPJMN dalam konteks peran daerah menjadi salah satu prioritas utama.

Hasil penelitian yang dilakukan Haryadi (2015) dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan mempertimbangkan sejumlah pandangan sejumlah narasumber pemerintah dan swasta di Provinsi Papua dan Provinsi Aceh,

riset ini menemukan bahwa kedua provinsi tersebut belum berperan optimal dalam menopang kebijakan yang sama secara nasional. Dalam konteks inilah, kemauan politik pemerintah masih sangat dibutuhkan sedemikian rupa dapat membuka peran daerah dalam isu tersebut. Termasuk di dalamnya adalah kebutuhan mendesak untuk penguatan koordinasi dan upaya sinergis lainnya antara pusat dan daerah, dan upaya yang sama dalam mengelola dukungan masyarakat secara umum. Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu diatas. Penelitian ini memang bukan membahas mengenai Tsunami Aceh akan tetapi penelitian ini membahas mengenai mitigasi bencana alam. Dalam mitigasi bencana alam yang dibahas dipenelitian ini adalah mengenai mitigasi bencana alam dalam sektor kehutanan di wilayah Aceh dan Papua, oleh karena itu celah peneliti adalah membahas kebijakan pemerintahan SBY dalam hal mitigasi bencana alam dalam aspek bencana alam Tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 (Haryadi, 2015).

Berdasarkan kajian penelitian diatas, beberapa penelitian telah ada yang mengkaji tentang kebijakan pemerintah dalam penanganan Tsunami Aceh pada tahun 2004, namun untuk penelitian tentang kebijakannya hanya memfokuskan kajiannya pada satu bidang aspek penanganan seperti contoh transportasi, ekonomi, dan hubungan bilateral antar negara sehingga posisi peneliti dalam hal ini adalah mengembangkan kajian penelitian yang telah ada. Pada penelitian terdahulu hanya membahas tentang Kebijakan pemerintah SBY dalam aspek rekontruksi wilayah Aceh seperti transportasi, ekonomi serta hubungan bilateral dengan negara lain, sedangkan peneliti akan menekankan pembahasan tentang kebijakan pemerintahan SBY dalam menangani Tsunami Aceh pada tahun 2004. Penanganan Pemerintahan SBY tersebut dalam aspek rehabilitasi dan rekontruksi. Tidak lupa hambatan dan dampak dari penanganan Tsunami Aceh akan menjadi fokus kajian dari penelitian ini.

Proses rekontruksi sejarah membutuhkan metode pendekatan dan teori yang berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan berbagai masalah yang terkait dalam peristiwa sekaligus untuk mengaitkan fakta yang satu dengan yang lainnya. Sethingga terbentuk suatu pembangunan yang utuh. Di dalam penulisan sejarah

memerlukan kerangka teori sebagai dasar pemikir yang dipakai dalam melakukan analisis (Kartodirjo, 1993:2).

Dalam upaya untuk menjelaskan berbagai persoalan yang ada, dalam skripsi ini menggunakan pendekatan Sosiologi Politik. Pendekatan sosiologi politik ini mengkaji ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando di dalam sebuah lapisan masyarakat dan masyarakat nasional. Objek pendekatan sosiologi politik menganalisis kekuasaan di dalam masyarakat secara menyeluruh yang mencakup konflik antar individu-individu dan kelompok untuk memperoleh kekuasaan. Dasar sosiologi politik ialah menegakkan ketertiban sosial (Duverger, 1998:18-29).

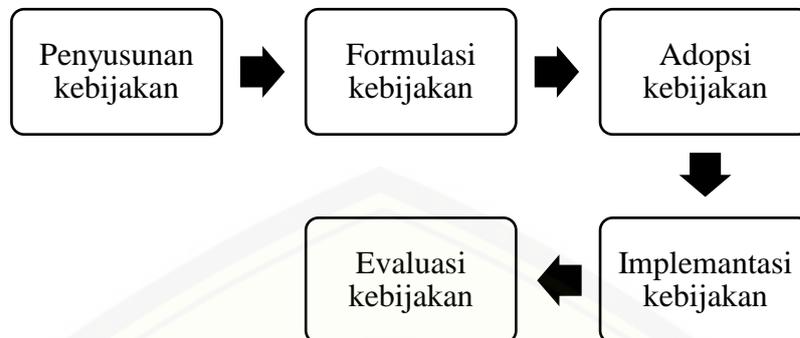
Pendekatan sosiologi politik ini dilandasi pemikiran bahwa seorang pemimpin bukan hanya untuk mencapai tujuan yang akan dicapai dalam suatu tujuan negara. Tanpa masyarakat, tujuan untuk memajukan negara tidak akan dapat tercapai. Pemakaian pendekatan sosiologi politik dapat membantu penulis mengetahui sejauh mana seseorang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh misalnya keputusan kebijakan, kewenangan politik, pengendalian sosial, dan perubahan sosial (Budiardjo, 2003:20). Sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, dan komando di dalam semua lapisan masyarakat, tidak hanya di dalam masyarakat nasional. Pengertian tersebut pada dasarnya membedakan antara pemerintah dengan yang diperintah. Di dalam suatu kelompok manusia terdapat orang yang memerintah dan orang yang mematuhi, terdapat mereka yang membuat keputusan dan orang-orang yang menaati keputusan tersebut. Ilmu sosiologi politik adalah gabungan antara ilmu sosial dan politik yang berfokus pada hubungan antara masyarakat dan pemerintah, dimana pemerintah lebih berperan untuk mengatur masyarakat melalui lembaga pemerintahannya.

Pendekatan sosiologi politik ditujukan kepada para pembuat keputusan yang memiliki kekuasaan yang langsung menentukan perkembangan politik serta jalannya pemerintahan dalam suatu masyarakat. Begitu pula dengan pemerintahan SBY. Bencana alam Tsunami Aceh membutuhkan penanganan cepat dan tepat dari pemerintah. Para korban Tsunami Aceh pada tahun 2004 banyak yang terkena

depresi karena Tsunami yang terjadi. Bahkan Pemerintahan daerah tidak bisa berjalan seperti biasanya karena ada beberapa gubernur yang hilang dan meninggal karena peristiwa Tsunami Aceh ini. Pendekatan sosiologi politik disini digunakan untuk melihat pengambilan keputusan atau kebijakan SBY dalam menangani masalah Bencana alam Tsunami Aceh pada tahun 2004. Menurut peneliti pendekatan sosiologi politik sangat cocok digunakan sebagai alat untuk menganalisis pengambilan kebijakan pada Pemerintahan Presiden Susilo Bambang dalam menangani Tsunami Aceh pada tahun 2004

Selain menggunakan pendekatan, Sebagai acuan teoritis peneliti memilih teori kebijakan publik dari William Dunn. Kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintahan (Dunn, W, 2003:132). Secara ringkas, lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarki-nya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah atau provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten atau kota, dan keputusan bupati atau walikota.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut :



#### 1. Tahap penyusunan agenda

Pemerintah menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.

#### 2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

#### 3. Tahap adopsi kebijakan

Tahap adopsi kebijakan ini berasal dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

#### 4. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mungkin akan mendapat dukungan dari para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat dalam meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu ditentukan kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

### BAB 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian sejarah, oleh karena itu metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1985:32). Langkah-langkah yang digunakan dalam metode penelitian sejarah terdiri dari empat langkah, yaitu: (1) heuristik; (2) kritik; (3) interpretasi dan; (4) historiografi.

#### 1. Heuristik

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti mencari sumber-sumber sampai mendapatkan sumber. Pada tahap ini peneliti mencari, menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji. Sumber yang berhasil dikumpulkan berupa sumber tertulis baik berupa artikel, buku, dokumen, dan penelitian terdahulu. Sumber yang berhasil dikumpulkan kemudian dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan-laporan Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) dan Laporan dari lembaga donor luar negeri seperti World Bank dan MDF (Multi Donor Fund). Selain laporan ada juga buku dari Dr. Dino Patti Djalal yang berjudul "*Harus Bisa: Memimpin Ala SBY*". Dikatakan sumber primer karena penulis sebagai saksi yang hidup sejaman pada peristiwa tersebut, hadir sebagai pelaku yang menyaksikan secara langsung serta mengetahui bagaimana Penanganan Presiden SBY menangani peristiwa Tsunami Aceh tahun 2004 (Gottschalk, 1985: 35). Tidak lupa juga sumber primer penelitian ini berupa surat keputusan Presiden SBY yang dikeluarkan setelah peristiwa Tsunami terjadi ataupun Instruksi Presiden pada saat penanggulangan bencana alam Tsunami Aceh.

Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi pustaka berupa buku-buku, penelitian terdahulu, koran baik online maupun cetak, majalah dan dokumen lainnya yang relevan seperti buku karya Ihsan

dan Budiono (2013) berjudul "*Pemimpin Dipuji dan Dicaci*", Dino (2009) berjudul "*Energi Positif*", Budiono (2012) berjudul "*Memimpin di Era Politik Gaduh*", Patrick, Michael dan Reid (2012) berjudul "*Aceh Pasca Tsunami dan Pasca Konflik*". Sumber sekunder yang peneliti dapatkan juga berupa Koran (Surat Kabar) dan Majalah, Skripsi, Jurnal Nasional, Jurnal Internasional. Sumber sekunder itu diantaranya "*Berharap di Tengah Segudang Masalah*" dalam Tempo, 35/XXXIII, 25 Oktober 2004, "*Kerumunan di Balik SBY*" dalam Kompas, 16 Juni 2009. "*SBY dan JK Berebut Perdamaian Aceh*" dalam Kompas, 20 Mei 2009.

Sumber sekunder berupa jurnal penelitian antara lain Nazamuddin (2007) berjudul "*Kebijakan Ekonomi Untuk Mitigasi Bencana Dan Pemulihan Pascabencana : Pelajaran Dari Bencana Tsunami Di Aceh*", Tejakusuma (2005) berjudul "*Analisis Pasca Bencana Tsunami Aceh*", Matsumaru, Nagami, dan Takeya (2012) berjudul "*Reconstruction of the Aceh Region following the 2004 Indian Ocean tsunami disaster: A transportation perspective*", John Cosgrave (2005) berjudul "*Tsunami Evaluation Coalition: Initial Findings*", Levholt, Bungum, Harbitz, S. Glimsdal, and G. Pedersen yang berjudul "*Earthquake Related Tsunami Hazard Along The Western Coast of Thailand*", Lau, Switzer, Aitchison, & Zong yang berjudul "*Written Records of Historical Tsunamis in The Northeastern South China Sea – Challenges Associated With Developing A New Integrated Database*", Jean Claude Sibuet, etc yang berjudul "*26th December 2004 Great Sumatra-Andaman Earthquake: Co-Seismic and Post-Seismic Motions in Northern Sumatra*", Haryadi yang berjudul "*Climate Changes Mitigation Policy of Forestry Sector for Middle Term Development Planning 2015-2019 in the Provinces of Papua and Aceh*".

Peneliti memperoleh sumber sekunder dari UPT Perpustakaan Universitas Jember, Ruang Baca Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unej, Internet dan koleksi pribadi peneliti. Dari sumber-sumber yang dipaparkan diatas tidak kemungkinan sumber yang akan digunakan peneliti bertambah dengan seiringnya perjalanan melakukan penelitian.

## 2. Kritik

Langkah selanjutnya dalam penelian sejarah ini adalah kritik sumber. Setelah mengumpulkan sumber-sumber sejarah, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengadakan kritik sumber, baik sumber primer maupun sekunder dilakukan kritik. (Sjamsudin, 2007:104). Dalam tahap ini, peneliti melakukan uji keabsahan tentang keaslian sumber dengan melakukan dua tahap kritik yaitu kritik ekstern dan kritik intern (Abdurahman, 2007: 68).

Pada kegiatan kritik ekstern untuk sumber dokumen peneliti melakukan pengujian atas keaslian sumber dengan menyeleksi secara fisik sumber yang telah diperoleh, menyelidiki jenis kertas, tinta dan gaya tulisan yang digunakan. Selain itu, peneliti juga menyelidiki tahun pembuatan sehingga sumber tersebut dapat dipastikan autentitasnya. Untuk kritik ekstern penulis menguji buku-buku serta jurnal dan keputusan Presiden yang berupa Intruksi maupun yang lainnya.

Pertama, peneliti mengkritik sumber yang berupa buku, Buku dari Dino Patti Djalal yang berjudul "*Harus Bisa: Memimpin ala SBY*" dan "*Energi Positif*". Buku dari Dino Patti Djalal merupakan buku penunjang dari peneliti dikarenakan buku tersebut dikeluarkan pada tahun 2009 yang pada saat itu Presiden SBY masih menjabat sebagai Presiden dan penanganan Tsunami Aceh pada tahun tersebut oleh Pemerintahan SBY sudah selesai dilakukan dan diserahkan pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya ada buku dari kumpulan tulisan beberapa tokoh luar negeri yang membahas Tsunami Aceh yaitu Patrick, Michael, dan Anthony Reid yang berjudul "*Aceh Pasca Tsunami dan Pasca Konflik*". Buku ini adalah sumber sekunder dalam penulisan penelitian. Dalam kritik ekstern, buku ini diterbitkan pada tahun 2012. Meskipun penerbitan buku tersebut pada tahun 2012 akan tetapi buku tersebut berisi tulisan-tulisan dari penelitian yang dilakukan sebelum dan sesudah Tsunami Aceh terjadi. Selain buku peneliti juga menggunakan jurnal-jurnal internasional maupun nasional, koran baik cetak maupun online, skripsi, dan juga surat keputusan Presiden yang berupa undang-undang, instruksi ataupun keputusan langsung dari Presiden SBY dalam penulisan penelitian ini, Untuk

kritik yang pertama, “*Kerumunan di Balik SBY*” dan “*SBY dan JK Berebut Perdamaian di Aceh*” oleh Koran Kompas. Tulisan tersebut dijadikan sumber oleh peneliti karena dapat menjadi fakta mengenai Pasca Penanganan Tsunami Aceh yang bisa digunakan dalam penulisan penelitian. Kedua tulisan dari Kompas ini dikeluarkan pada tahun 2009.

Kritik tidak hanya dari buku dan koran akan tetapi peneliti juga mengkritik jurnal-jurnal penelitian yang ditemukan dan bersinggungan dengan peristiwa Tsunami Aceh tahun 2004. Jurnal penelitian tersebut antara lain jurnal penelitian dari Nazamuddin yang berjudul “*Kebijakan Ekonomi Untuk Mitigasi Bencana dan Pemulihan Pascabencana: Pelajaran dari Bencana Tsunami di Aceh*”. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2007. Jurnal ini sangat mendukung penulisan penelitian dari penulis yang sama-sama membahas tentang Tsunami Aceh. Jurnal ini dapat dijadikan sumber utama karena jurnal ini keluar beberapa bulan pasca terjadinya Tsunami di Aceh. Jurnal internasional dari Matsumaru, Nagami, dan Takeya yang berjudul “*Reconstruction of the Aceh Region following the 2004 Indian Ocean Tsunami Disaster: a Transportation Perspective*”. Jurnal ini sangat membantu karena berisi tentang rekonstruksi Tsunami Aceh pada bidang transportasi. Dan jurnal ini terbukti autentitasnya karena ditulis setelah melakukan penelitian lapang dan jurnal ini baru dipublish pada tahun 2012.

Jurnal penelitian dari John Cosgrave yang berjudul “*Tsunami Evaluation Coalition: Initial Findings*”. Jurnal ini dikeluarkan pada tahun 2005 dan terbukti autentiknya karena dikeluarkan pasca terjadinya Tsunami di Aceh. Selanjutnya jurnal penelitian dari Levholt, Bungum, Harbitz, S. Glimsdal, and G. Pedersen yang berjudul “*Earthquake Related Tsunami Hazard Along the Western Coas of Thailand*”. Jurnal ini berisi tentang bagaimanakah Tsunami terjadi di Kawasan Asia yang berdampak pada negara-negara di kawasan Asia. Jurnal ini dikeluarkan pada tahun 2006 setelah terjadinya Tsunami. Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Lau, Switzer, Aitchison, & Zong yang berjudul “*Written Records of Historical Tsunamis in The Northeastern South China Sea – Challenges Associated with Developing*

*A New Integrated Database*". Jurnal ini berisi tentang catatan Tertulis tentang Sejarah Tsunami di Laut Cina Selatan dengan tujuan pengembangan data terpadu pasca Tsunami. Jurnal ini dikeluarkan pada tahun 2010. Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Jean Claude Sibuet, etc yang berjudul "*26th December 2004 Great Sumatra-Andaman Earthquake: Co-Seismic and Post-Seismic Motions in Northern Sumatra*". Jurnal ini menceritakan bagaimana Tsunami Aceh terjadi serta bagaimanakah gerakan *Co-Seismik* dan *Pasca-Seismik* di Sumatera yang menyebabkan Tsunami di Aceh. Jurnal ini dipublikasikan pada bulan November tahun 2007. Dan yang terakhir jurnal penelitian yang ditulis oleh Haryadi yang berjudul "*Climate Changes Mitigation Policy of Forestry Sector for Middle Term Development Planning 2015-2019 in the Provinces of Papua and Aceh*". Jurnal ini berisi tentang kebijakan mitigasi penanganan perubahan iklim kehutanan di Papua. Meskipun pembahasan berbeda akan tetapi pengambilan kebijakan mitigasi yang dilakukan mempunyai kesamaan. Jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2016.

Selanjutnya yaitu kritik intern, pada tahap ini peneliti melakukan penilaian terhadap kesahihan sumber yang diperoleh. Kesaksian dalam sejarah merupakan faktor paling menentukan sah tidaknya bukti atau fakta sejarah (Abdurahman, 2007: 70). Kritik intern untuk dokumen atau buku dilakukan peneliti dengan cara memahami maksud dari kesaksian penulis dalam dokumen atau buku tersebut, sehingga peneliti dapat mengetahui dan memahami isi sumber dokumen atau buku yang digunakan. Pada tahap ini peneliti melihat substansi dari buku dan sumber yang digunakan dan kemudian membandingkan kesaksian dari berbagai sumber itu untuk memperoleh fakta sejarah yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Untuk kritik intern penulis menguji buku-buku serta jurnal dan keputusan Presiden yang berupa Intruksi maupun yang lainnya.

Pertama, peneliti mengkritik sumber yang berupa buku, Buku dari Dino Patti Djalal yang berjudul "*Harus Bisa: Memimpin ala SBY*" dan "*Energi Positif*". Buku dari Dino Patti Djalal merupakan sumber primer dari penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan penulis dari buku tersebut ada saat terjadinya

peristiwa Tsunami. Selain itu, kesaksian dari Dino Patti Djalal dapat dipertanggungjawabkan karena Dino Patti Djalal adalah Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia sekaligus Juru Bicara dari Presiden pada masa Pemerintahan SBY. Penulis memilih buku dari Dino karena saat terjadinya Tsunami Aceh yang menemani pada saat di wilayah yang terkena Tsunami salah satunya adalah Dino Patti Djalal. Buku dari Dino selain memberikan kesaksian Tsunami Aceh, Dino juga mengumpulkan pendapat dari para tokoh besar lainnya yang memberikan pendapat tentang penanganan Tsunami Aceh tahun 2004 oleh Pemerintahan SBY yang ada pada buku "*Energi Positif*". Selanjutnya ada buku dari kumpulan tulisan beberapa tokoh luar negeri yang membahas Tsunami Aceh yaitu Patrick, Michael, dan Anthony Reid yang berjudul "*Aceh Pasca Tsunami dan Pasca Konflik*". Buku ini adalah sumber sekunder dalam penulisan penelitian. Dalam kritik intern, penulis menggunakan buku ini karena buku ini berisi mengenai tulisan-tulisan penelitian mengenai Aceh sebelum dan sesudah terjadi Tsunami Aceh. Kesaksian yang dapat dipertanggungjawabkan dari tulisan ini adalah hasil dari fakta-fakta yang dipaparkan di buku ini adalah hasil riset dan ditulis oleh para ahlinya seperti pada ahli sejarah ada Anthony Reid.

Penelitian ini juga menggunakan jurnal-jurnal internasional maupun nasional, koran baik cetak maupun online, skripsi, dan juga surat keputusan Presiden yang berupa undang-undang, instruksi ataupun keputusan langsung dari Presiden SBY dalam penulisan penelitian ini, Untuk kritik yang pertama, "*Kerumunan di Balik SBY*" dan "*SBY dan JK Berebut Perdamaian di Aceh*" oleh Koran Kompas. Tulisan tersebut dijadikan sumber oleh peneliti karena dapat menjadi fakta mengenai Pasca Penanganan Tsunami Aceh yang bisa digunakan dalam penulisan penelitian. Kesaksian dari tulisan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan pada tulisan ini diterbitkan setelah penanganan untuk masalah di Aceh yang dilakukan oleh Pemerintahan SBY. Selanjutnya, jurnal penelitian dari Nazamuddin yang berjudul "*Kebijakan Ekonomi Untuk Mitigasi Bencana dan Pemulihan Pascabencana: Pelajaran dari Bencana Tsunami di Aceh*". Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2007. Fakta yang

dipaparkan pada jurnal ini dapat dipertanggungjawabkan karena jurnal ini ditulis dengan hasil riset beberapa bulan pasca terjadinya Tsunami Aceh. Jurnal internasional dari Matsumaru, Nagami, dan Takeya yang berjudul *“Reconstruction of the Aceh Region following the 2004 Indian Ocean Tsunami Disaster: a Transportation Perspective”* membahas rekontruksi dalam hal Transportasi pasca Tsunami Aceh. Dalam jurnal tersebut dihasilkan fakta diantaranya, rekontruksi jaringan jalan di wilayah pesisir Banda Aceh, relokasi perumahan dan mobilitas penduduk pasca Tsunami, serta efek dari rekontruksi. Fakta tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena dalam jurnal tersebut di lampirkan foto dari hasil penelitian. Dan yang terakhir jurnal penelitian yang ditulis oleh Haryadi yang berjudul *“Climate Changes Mitigation Policy of Forestry Sector for Middle Term Development Planning 2015-2019 in the Provinces of Papua and Aceh”*. Jurnal ini berisi fakta bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mitigasi bencana alam. Salah satunya di sektor kehutanan yang dimana dalam sektor ini kebijakan mitigasi dalam sektor kehutanan sangat berpengaruh dalam mitigasi bencana alam. Fakta ini dapat di pertanggungjawabkan karena penelitian ini diambil pada tahun 2016 dan hasil penelitian dapat di akses di Jurnal Politica, yang artinya penelitian dari Haryadi sudah di cek kebenarannya.

Sumber-sumber yang dipaparkan oleh peneliti diatas adalah sumber yang baru ditemukan oleh peneliti. Peneliti akan mencari sumber yang lain dan relevan dengan penelitian. Sumber yang akan dicari yang paling penting adalah surat-surat keputusan Presiden tentang penanganan Tsunami Aceh dalam bentuk Instruksi, Undang-undang atau yang lainnya. Selain itu, peneliti juga akan mencari dokumern-dokumen mengenai rehabilitasi dan rekontruksi pasca Tsunami Aceh ataupun sumber lain yang menunjang penelitian.

### **3. Interpretasi**

Tahap ketiga dalam metode penelitian ini ialah interpretasi. Setelah peneliti berhasil menemukan fakta dari hasil kritik ekstern dan kritik intern, kegiatan selanjutnya yaitu menggabungkan fakta-fakta tersebut hingga

menjadi satu kesatuan yang utuh. Hal tersebut dilakukan karena fakta hasil dari kritik ekstern dan kritik intern sifatnya masih berdiri sendiri, sehingga perlu diinterpretasikan supaya dapat menjadi sebuah cerita yang memiliki kesesuaian dengan peristiwa sesungguhnya. Penggabungan fakta dilakukan dengan menafsirkan secara sistematis, rasional, logis dan kronologis sehingga membentuk kisah sejarah yang mudah dimengerti. Kegiatan peneliti pada tahap ini yaitu melakukan penafsiran terhadap Kebijakan Pemerintahan SBY dalam Menangani Tsunami Aceh Tahun 2004 dengan menghubungkan makna dari fakta-fakta yang didapat dari hasil studi kepustakaan kemudian dirangkai secara kronologis dengan aspek sebagai berikut: (1) Latar belakang Tsunami Aceh pada tahun 2004 ditetapkan menjadi Bencana Nasional; (2) Upaya pemerintahan SBY dalam menangani Tsunami Aceh pada tahun 2004; (3) Hambatan yang dihadapi pemerintahan SBY dalam penanganan Tsunami Aceh pada tahun 2004; (4) Dampak penanganan Tsunami Aceh pada tahun 2004 terhadap citra pemerintahan SBY dan terhadap kondisi rakyat Aceh khususnya korban Tsunami Aceh.

#### **4. Historiografi**

Historiografi merupakan sebuah paparan, penyajian, presentasi, atau penampilan (*eksposisi*) (Sjamsudin, 2007:236). Langkah terakhir peneliti melakukan historiografi atau penyajian hasil interpretasi fakta dalam bentuk tulisan. Gottschalk (1985:32) historiografi merupakan kegiatan akhir dari langkah penelitian sejarah yang merupakan kegiatan merekonstruksi secara imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh. Dapat dikatakan bahwa metode historiografi merupakan metode puncak dari rangkaian kerja seorang peneliti, dari tahap inilah dapat diketahui baik buruk hasil kerja secara keseluruhan.

Dalam hal ini, peneliti harus memiliki kemampuan menampilkan kejelasan serta kerapian ekspresi penulisan sehingga fakta sejarah dapat dirangkai secara kronologis dan sistematis sehingga menjadi kisah sejarah yang bermakna. Historiografi yang dilakukan oleh peneliti menuliskan cerita sejarah

tentang kebijakan Pemerintahan SBY dalam penanganan bencana alam Tsunami Aceh pada tahun 2004 dengan cara merangkai fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh menjadi suatu kisah sejarah ilmiah yang jelas, rasional, logis, dan objektif. Kemudian menyusun sejarah tersebut secara kronologis dan sistematis serta dapat diyakini kebenarannya.

Susunan hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan sistematika penulisan yang terdiri dari enam bab. Bab 1 adalah pendahuluan yang menyangkut latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada Bab 2 berisi tentang tinjauan pustaka yang berisi penelitian terdahulu mengenai Tsunami Aceh pada tahun 2004 dan keadaan Pasca Tsunami Aceh, serta pendekatan dan teori yang cocok terhadap penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pada Bab 3 berisi tentang metode penelitian yang digunakan untuk menyusun karya ilmiah skripsi ini, yang terdiri dari empat tahap metode penelitian yakni Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Pada bab ini dipaparkan dan dijelaskan mengenai cara-cara yang digunakan peneliti dalam hal mengumpulkan sumber, data, dan merekonstruksi fakta sejarah yang nantinya akan menjadi satu kesatuan yang utuh, kronologis, sistematis, serta rasional.

Sumber penelitian yang digunakan untuk penulisan Bab 1,2 dan 3 yang menjadi proposal penelitian ini memakai sumber penelitian antara lain Abdurahman yang berjudul "*Metodologi Penelitian Sejarah*", Amri yang berjudul "*RBI: Risiko Bencana Indonesia*", William Dunn yang berjudul "*Analisis Kebijakan Publik*", Duverger yang berjudul "*Sosiologi Politik*", Gottschalk yang berjudul "*Mengerti Sejarah*", Kartodirjo yang berjudul "*Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*", Sjamsudin yang berjudul "*Metodologi Sejarah*", Adji yang berjudul "*Social Economic Integration In Aceh: Prior-Post Tsunami*", BRR yang berjudul "*Aceh dan Nias Satu Tahun Setelah Tsunami Upaya Pemulihan dan Kegiatan yang Akan Datang Banda Aceh*", Badan Pusat Statistik yang berjudul "*Penduduk ACEH Pasca Gempa dan Tsunami*".

Jurnal penelitian antara lain Haryadi yang berjudul “*Climate Changes Mitigation Policy of Forestry Sector for Middle Term Development Planning 2015-2019 in the Provinces of Papua and Aceh*”, Matsumaru, Nagami, & Takeya yang berjudul “*Reconstruction of the Aceh Region Following the 2004 Indian Ocean Tsunami Disaster: a Transportation Perspective*”, Nazamuddin yang berjudul “*Kebijakan Ekonomi Untuk Mitigasi Bencana dan Pemulihan Pascabencana: Pelajaran Dari Bencana Tsunami Di Aceh*”, Subiyantoro yang berjudul “*Laporan Investigasi Kondisi Perempuan dan Anak-anak*”, Maradi, Wirananta, dan Parameswari yang berjudul “*Peranan Australia Dalam Pembangunan Aceh Pasca Bencana Tsunami Melalui Kerangka Kerjasama AIPRD Periode 2005-2009*”, “*Catatan SBY Soal Persoalan Pelik dalam Penanganan Pasca Tsunami Aceh*”, “*SBY, Tsunami dan Kedamaian di Aceh*”.

Buku dan jurnal diatas adalah sebagai sumber penulisan argument pada bab 1 dan untuk penunjang landasan yuridisnya peneliti mencari surat surat yang dikeluarkan Presiden. Peneliti dalam landasan yuridis menggunakan sumber antara lain, “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2004 tentang *Penetapan Bencana Alam Gempa Bumi Dan Gelombang Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Provinsi Sumatera Utara* Sebagai Bencana Nasional Dan Hari Berkabung Nasional”, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang *Kegiatan Tanggap Darurat Dan Perencanaan Serta Persiapan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi Dan Gelombang Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Provinsi Sumatera Utara*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang *Penanggulangan Bencana*, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang *Rencana Induk Rehabilitasi Dan Rekontruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara*, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 11 Tahun 2008 tentang *Pedoman Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana*,

Bab pembahasan terdiri 5 bab, Bab (4) empat, (5) lima, (6) enam, (7) tujuh, dan (8) delapan. Pada Bab (4) empat, peneliti akan memaparkan latar

belakang Tsunami Aceh ditetapkan menjadi bencana nasional. Tidak semua bencana alam yang terjadi dapat dijadikan bencana nasional. Ada hal-hal pokok yang harus dipertimbangkan untuk menetapkan bencana alam yang terjadi menjadi bencana nasional. Oleh karena itu, pada bab ini akan dijelaskan latar belakang Tsunami Aceh dijadikan bencana nasional sekaligus menjadi pengantar untuk bab selanjutnya yang akan dibahas oleh peneliti.

Sumber yang digunakan sebagai penunjang penulisan pada bab (4) empat ini antara lain, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2004 *tentang Penetapan Bencana Alam Gempa Bumi Dan Gelombang Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Provinsi Sumatera Utara Sebagai Bencana Nasional Dan Hari Berkabung Nasional*, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 *Tentang Kegiatan Tanggap Darurat Dan Perencanaan Serta Persiapan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi Dan Gelombang Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Provinsi Sumatera Utara*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 *tentang Penanggulangan Bencana*, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 *tentang Rencana Induk Rehabilitasi Dan Rekontruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara*.

Bab (5) lima peneliti akan memaparkan upaya-upaya pemerintahan SBY dalam menangani Tsunami Aceh pada tahun 2004. Upaya yang akan dijelaskan adalah upaya-upaya yang bertujuan menanggulangi Tsunami dan sekaligus membangun kembali Aceh. Inti dari bab ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pemerintahan SBY dalam penanganan bencana alam dalam upaya rekontruksi dan rehabilitasi.

Sumber yang akan digunakan sebagai penunjang pada penulisan bab (5) lima ini antara lain, Abdullah yang berjudul "*Dialektika Natur, Kultur Dan Struktur: Analisis Konteks, Proses dan Ranah Dalam Konstruksi Bencana*", Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias berjudul "*Laporan Tahunan Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias. Banda Aceh*", Badan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias yang berjudul “*Laporan Kegiatan Dua Tahun Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias*”, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias berjudul “*Building a Land of Hope, One Year Report Executing Agency of the Rehabilitation and Reconstruction Agency for Aceh and Nias*”, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias yang berjudul “*Laporan Kegiatan Enam Bulan Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias*”.

Bab (6) enam penulis akan mengkaji mengenai hambatan-hambatan yang terjadi pada saat pemerintahan SBY dalam menangani Tsunami Aceh pada tahun 2004. Dalam menerapkan suatu kebijakan pasti ada hambatan atau persoalan yang muncul. Begitu juga dengan kebijakan pemerintahan SBY dalam menangani Tsunami Aceh pada tahun 2004. Persoalan-persoalan yang akan dipaparkan disini adalah hasil dari identifikasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi Dan Rekontruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat NAD Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dan juga hasil perbandingan dari Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana guna melihat apakah yang menjadi persoalan atau hambatan dari penanganan oleh pemerintahan SBY pada saat melakukan penanganan Tsunami Aceh tahun 2004. Dari hasil identifikasi PP dan melihat Pedoman BNPB dapat diambil beberapa permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti yaitu, (1) Ketidakpercayaan pihak asing dengan Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi, (2) Hambatan pada bidang Informasi, Komunikasi, dan Transportasi.

Sumber yang dipakai untuk menunjang penulisan bab ini antara lain, Fritz Institute berjudul “*Tsunami Victims Still Homeless*”, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies berjudul “*World Disaster Report: Focus on Information in Disaster*”, Frankenberg berjudul “*Mortality, the Family, and the Indian Ocean Tsunami*”, Hambali berjudul “*Alat Transportasi Jadi Kendala Pemberian Bantuan*”, Frankenberg yang berjudul

*“In the Wake of the Tsunami: Destruction of Community Revisited.”*, Hoffman yang berjudul *“The Monster And The Mother: The Symbolism Of Disaster”*, Abdullah yang berjudul *Dialektika Natur, Kultur Dan Struktur: Analisis Konteks, Proses dan Ranah Dalam Konstruksi Bencana*”, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias berjudul *“Laporan Tahunan Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias. Banda Aceh”*, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias yang berjudul *“Laporan Kegiatan Dua Tahun Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias”*, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias berjudul *“Building a Land of Hope, One Year Report Executing Agency of the Rehabilitation and Reconstruction Agency for Aceh and Nias”*, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias yang berjudul *“Laporan Kegiatan Enam Bulan Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias”*.

Bab (7) tujuh menjelaskan dampak penanganan Tsunami Aceh terhadap pemerintahan SBY dan kondisi rakyat Aceh. Setiap penyelesaian masalah penting seperti bencana alam Tsunami Aceh oleh pemerintah akan berdampak pada penilaian rakyat. Rakyat Indonesia akan menilai bagaimana pemerintahan dalam menghadapi masalah tersebut. Dari penilaian tersebutlah akan berdampak pula pada pemerintahan SBY. Tidak lupa juga dampak dari penanganan pemerintah juga berakibat pada kondisi masyarakat yang terkena bencana alam tersebut, yang tidak lain masyarakat tersebut adalah rakyat Aceh. Rakyat Aceh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang terkena dampak dari terjadinya Tsunami Aceh yaitu orang yang tinggal pada wilayah pesisir Aceh. Disini peneliti akan berusaha menjawab dan melihat bagaimanakah Pemerintahan SBY dimata rakyat Indonesia setelah penanganan bencana alam Tsunami Aceh pada tahun 2004 dan juga kondisi rakyat Aceh khususnya wilayah pesisir Aceh pasca penanganan dari pemerintahan. Peneliti akan menjawab pertanyaan tersebut pada bab 7 ini melalui analisis beberapa sumber dan fakta yang terungkap.

Sumber yang dipakai untuk menunjang bab ini antara lain, Perpres No. 30 Tahun 2005 tentang *Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat NAD-Nias*, Pratama berjudul “*Indonesia Berhasil Tangani Masalah Kesehatan Akibat Bencana di Prov. NAD dan Sumut*”, Thomas berjudul “*Mental Health in Sumatra after the Tsunami*”, Reuter yang berjudul “*Aceh Reconstruction Agency Seen Performing Better-Poll*”, M. Taufiqurrahman berjudul “*House Dismayed by Slow Aceh Reconstruction*”, International Crisis Group (ICG) berjudul “*Islamic Law and Criminal Justice in Aceh*”, Djalal yang berjudul “*Harus Bisa: Seni Memimpin Ala SBY*”, Djalal yang berjudul “*Energi Positif : Opini 100 Tokoh mengenai Indoneisa di Era SBY*”, Flamoyan yang berjudul “*18 Negara Berikan Bantuan ke Aceh*”, Fritz Institute berjudul “*Tsunami Victims Still Homeless*”, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies berjudul “*World Disaster Report: Focus on Information in Disaster*”, Frankenberg berjudul “*Mortality, the Family, and the Indian Ocean Tsunami*”. Selain sumber yang telah dikumpulkan diatas, dalam proses penulisan penulis selalu mencari referensi terbaru yang relevan dengan penelitian. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya sumber sampai proses penulisan ini selesai.

Terakhir, pada bab (8) delapan Penutup berisi tentang kesimpulan dari seluruh uraian penulis mengenai penelitiannya dan saran yang berisi rekomendasi penulis berdasarkan hasil penelitiannya untuk penelitian selanjutnya, serta sumber-sumber atau pustaka yang digunakan penulis untuk menunjang penelitiannya.

## **BAB 5. UPAYA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DALAM PENANGANAN TSUNAMI ACEH TAHUN 2004**

Bencana gempa bumi yang berkekuatan 8,9 skala Richter yang diikuti gelombang tsunami melanda sebagian besar kawasan pesisir Aceh. Tsunami tersebut menelan korban jiwa maupun harta dalam jumlah yang besar. Akibat dari bencana tersebut kehidupan masyarakat di wilayah yang terkena bencana mengalami kerusakan hampir di seluruh bidang. Untuk membangun kembali wilayah Aceh Pemerintah SBY melakukan upaya penanganan bencana. Upaya penanggulangan dan pemulihan tersebut dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Pelaksanaan upaya-upaya tersebut Pemerintah dibantu oleh berbagai lembaga donor luar negeri dalam setiap proses penanggulangannya. Selanjutnya ketiga tahapan tersebut akan dijelaskan secara rinci dibawah ini.

### **5.1 Fase Tanggap Darurat**

Fase penanggulangan bencana alam Tsunami Aceh yang pertama adalah Fase Tanggap Darurat. Fase Tanggap Darurat dilaksanakan 3 bulan pasca terjadinya tsunami yaitu pada bulan Januari sampai Maret tahun 2005. Tujuan dilaksanakan Fase Tanggap Darurat adalah menyelamatkan masyarakat yang masih hidup, mampu bertahan dan segera terpenuhinya kebutuhan dasar bagi para korban (BRR, 2005). Fase Tanggap Darurat dilaksanakan setelah penetapan status bencana alam Tsunami Aceh menjadi bencana nasional oleh Pemerintah SBY. Setelah penetapan status bencana nasional yang ditandai dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2004, Pemerintah SBY melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2005 melakukan fase tahap tanggap darurat yang dilaksanakan selama 3 bulan dan berakhir pada tanggal 26 Maret 2005 (Inpres, 2005). Sasaran utama dari tahap tanggap darurat ini adalah penyelamatan dan pertolongan kemanusiaan. Dalam tahap tanggap darurat ini, dilaksanakan penyelesaian tempat penampungan sementara yang layak (Posko Pengungsi) serta pengaturan dan pembagian logistik yang cepat dan tepat sasaran kepada seluruh korban bencana yang masih hidup.

Pelaksanaan Fase Tanggap Darurat menurut estimasi membutuhkan anggaran sebanyak Rp. 2 Triliun. Anggaran tersebut digunakan demi terlaksananya penyelesaian tempat penampungan atau Posko pengungsian dan pembagian logistik kepada seluruh korban bencana alam tsunami di wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Lhokseumawe, Langsa, Aceh Selatan, Singkil, Pidie, dan Beureun. Dengan penetapan status bencana nasional membuka peluang untuk bantuan internasional dari negara-negara luar antara lain Amerika Serikat, Australia, Switzerland, Rusia, Qatar untuk memberikan bantuan. Indonesia mendapat simpati dan perhatian dunia sehingga negara-negara maupun organisasi internasional seperti UNDP, IFRC, PBB, UNESCO, dan Lembaga Donor lainnya. Berbagai macam bantuan diberikan seperti, bantuan dana, bantuan pangan, sanitasi, shelter, transportasi udara, bantuan medis (Sisiria & McCawley, 2010).

Bantuan Amerika Serikat (US) terhadap tanggap darurat Tsunami Samudera Hindia dipublikasikan secara resmi dalam bulletin yang dirilis oleh *U.S Agency for International Development, Bureau for Legislative and Public Affairs*. Indonesia mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat sebanyak \$100,000 yang disalurkan melalui palang merah maupun badan penanggulangan bencana. Untuk rincian bantuan tanggap darurat yang diberikan oleh US ada dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.1 Bantuan Amerika terhadap Indonesia

<b>Bantuan Amerika untuk Fase Tanggap Darurat pasca Tsunami Aceh</b>	
<b>Bantuan dari Militer Amerika:</b>	<b>Bantuan sipil dari Amerika:</b>
1. Pesawat pengangkut Lincoln dan kapal Amerika lain, helikopter dan pesawat induk untuk mengirimkan bantuan;	1. 80 truk sewa untuk mengirimkan bantuan;
2. Sekitar 16.000 prajurit US dan AU membantu pengiriman bantuan dan mengevakuasi korban luka;	2. Peralatan dapur untuk 100.000 orang;
	3. Jaring nyamuk untuk 30.000 orang;
	4. Kontainer air untuk 210.000 orang;

- 
- |  |   |
|--|---|
| 3. Rumah sakit kapal militer US merawat 20.000 korban tsunami; | 5. Peralatan higienis untuk 10.000 orang; |
| 4. 4,8 juta pon makanan, air dan obat-obatan.                  | 6. Tenda plastik untuk 690 orang;         |
|  | 7. 25 juta kru kebersihan.                |
- 

Sumber: Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, Indian Ocean Tsunami, 2014

Dari tabel di atas bisa dilihat jika bantuan dari Amerika Serikat beragam dan lebih didominasi oleh bantuan non-pangan seperti personil militer, bantuan medis, keperluan sanitasi, keperluan rumah tangga, tenda, dan tim kebersihan. Militer US pada hari Jum'at, 31 Desember 2004, mengirimkan tim udara US Abraham Lincoln untuk mendistribusikan makanan dan air bersih kepada pengungsi di pesisir Aceh. Lalu, helikopter dan pesawat angkatan laut A.S. dari kapal induk Abraham Lincoln dan Bonhomme Richard menerbangkan bantuan berupa 4,8 juta pon makanan, air dan obat-obatan (U.S. Agency for International Development, 2005:8). Militer Amerika mengevakuasi 3.000 korban tsunami Indonesia ke tempat penampungan dan rumah sakit. Di bandara Banda Aceh setiap pagi, 20 perwira AS, Jerman, Jerman, Australia dan militer lainnya bertemu dengan petugas U.N untuk mengkoordinasikan bantuan (U.S. Agency for International Development, 2005:9).

Australia sehari setelah terjadinya tsunami di Aceh tepatnya pada tanggal 27 Desember 2004 mengirimkan 4 helikopter jenis Hercules RAAF-C130 untuk mengirimkan staff medis dan suplai bantuan kemanusiaan lainnya ke Indonesia. Total bantuan dari pemerintah Australia untuk penanganan tanggap darurat Tsunami Aceh sebesar \$34.4 juta (Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, 2014). Selain Australia negara Swiss juga merespon peristiwa Tsunami Aceh dengan cepat. Swiss Humanitarian Aid mengirimkan Rapid Response Team untuk melihat lokasi dan menaksir kebutuhan apa saja yang diperlukan. Swiss menyumbang sebesar CHF 11,3 juta untuk kebutuhan tanggap darurat di Indonesia. Swiss juga turut memberikan sumbangan finansial kepada beberapa penyelenggara kegiatan darurat seperti IFRC, ICRC, WFP dan OCHA (Swiss Agency for Development and Cooperation, 2009).

Rusia juga memberikan bantuan tanggap darurat sebesar \$10 juta kepada negara-negara terdampak tsunami, namun tidak disebutkan pembagian ke setiap negara (BBC, 2005). Berikutnya, Qatar memberikan \$25 juta dan bantuan medis serta logistik yang juga tidak dicantumkan berapa pembagian ke setiap negara (BBC, 2005). Selain negara-negara diatas masih banyak lagi yang memberikan bantuan kemanusiaan untuk tanggap darurat di Aceh. Selanjutnya Pemerintahan SBY melakukan upaya-upaya penanganan darurat yang melibatkan masyarakat dalam melakukan tanggap darurat.

Salah satu upaya penanganan darurat yang dilaksanakan Pemerintahan SBY adalah memobilisasi sumber daya nasional dan daerah dalam pelaksanaan tanggap darurat. Dalam rangka mengkoordinasikan pengendalian dan penanggulangan bencana dan segala upaya tanggap darurat, pada tahap awal Wakil Gubernur NAD secara langsung mengkoordinasikan dan mengendalikan penanggulangan bencana sampai dibentuk Satuan Koordinasi Pelaksana Khusus Aceh dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Bakornas PBP Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 30 Desember 2004. Satkorlak ini diketuai oleh Wakil Presiden dan Menko Kesra selaku Ketua Pelaksana Harian dan Wakil Gubernur NAD sebagai Pelaksana di tingkat Provinsi.

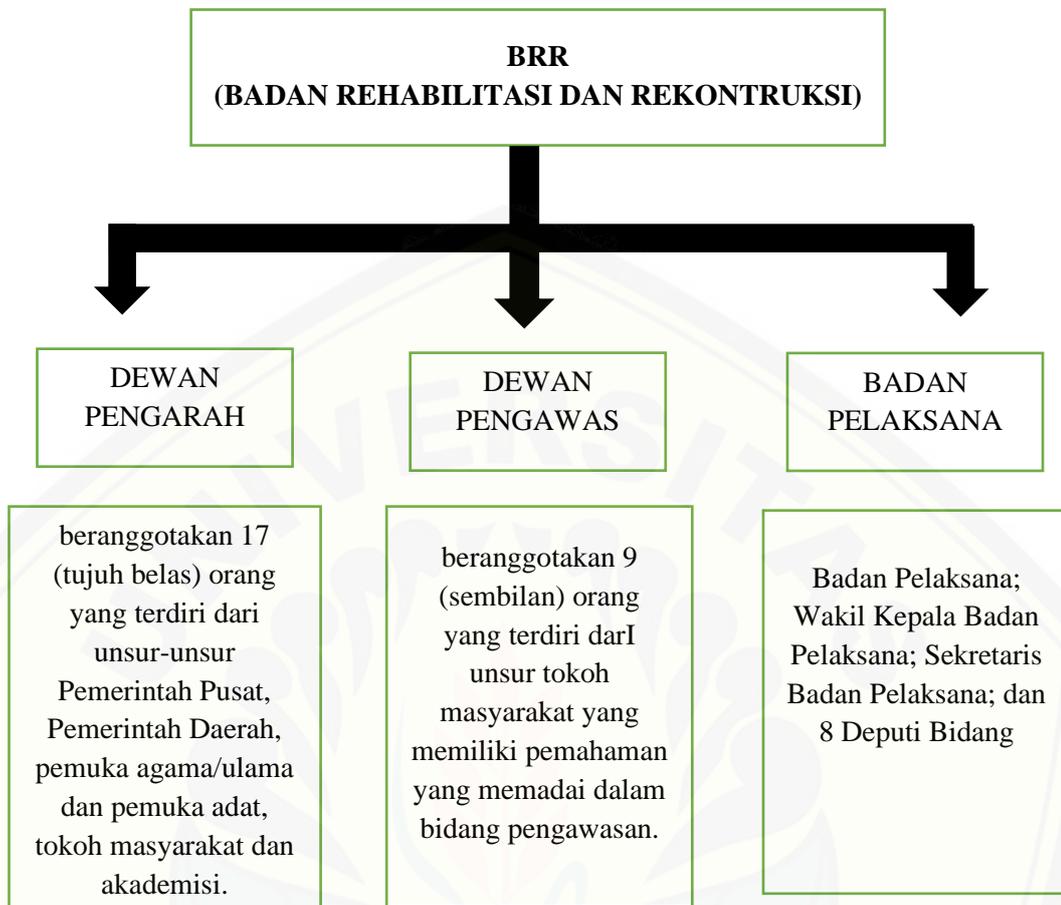
Mengingat dampak bencana yang sangat luas, selanjutnya Pemerintah Pusat guna memperkuat Satkorlak PBP di Provinsi NAD, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 3 Tahun 2005 tanggal 18 Januari 2005 yang menempatkan Menko Kesra sebagai ketua Satkorlak Khusus, Wakasad sebagai Wakil Ketua I dan Wakil Gubernur NAD sebagai Wakil Ketua II yang khusus mengkoordinasikan pemulihan fungsi pemerintahan.

Pada tahap tanggap darurat masyarakat Aceh, Pemda provinsi dan kabupaten/kota di Aceh, unsur-unsur TNI, Palang Merah Indonesia, dan sejumlah besar LSM nasional dengan dukungan pendanaan dari perusahaan-perusahaan nasional, masyarakat umum dan pemerintah daerah lain, dengan sigap membantu menyelamatkan kehidupan dari dampak tsunami. Berkat tanggap darurat yang cepat dan struktur masyarakat yang kohesif, korban yang lebih banyak dapat dicegah. Respon masyarakat Indonesia tersebut sangat antusias dalam membantu

masyarakat Aceh. Dukungan tanggap darurat dari LSM lokal mempercepat evakuasi dan pemakaman korban, penanganan pengungsi, pemberian bantuan darurat, pembersihan kota dan penyiapan hunian sementara.

Perhatian masyarakat internasional lainnya, besarnya kesediaan (commitment) para donor multilateral dan bilateral. Tercatat sekitar 700 juta dolar AS telah dijanjikan oleh berbagai donor kepada pemerintah Indonesia. Pada tanggal 6 Januari 2005 atas inisiatif PM Singapura Lee Hsien Long, diadakan pertemuan internasional di Jakarta yaitu *Asean Leader's Meeting On Aftermath of Tsunami Disaster*. Pertemuan dihadiri oleh Sekjen PBB Kofi Annan, Menlu AS, PM Australia John Howard, PM Malaysia H. M. Abdullah Badawi, Presiden Laos, Thailand, Sri Lanka dan India. Pertemuan juga dihadiri perwakilan baik dari lembaga donor multilateral (WB, ADB, UN, dll) maupun dari lembaga donor bilateral (AS, Jepang, dan Belanda) (BRR, 2005).

Pemerintah Pusat bersama komunitas internasional menyiapkan analisis terhadap kerusakan dan kerugian akibat bencana. Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Peraturan Pemerintah ditindaklanjuti dengan pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2005 pada tanggal 16 April 2005. Sekaligus dibentuk Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini.



Pada tahap tanggap darurat ini telah berhasil diselamatkan area 80 m<sup>3</sup> dokumen/arsip pertanahan milik BPN Provinsi NAD. Upaya penyelamatan dilakukan kerja sama antara Arsip Nasional RI, BPN, JICA, Tokyo Reservation and Conservation Center, Japan International Cooperation Systems. Fase Tanggap Darurat diakhiri dengan keluarnya Inpres No.1 tahun 2005. Batas waktu yang diinstruksikan oleh presiden untuk menyelesaikan kegiatan tanggap darurat adalah sampai akhir Maret 2005. Dalam keputusan tersebut juga dihimbau segera melaksanakan fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Presiden SBY melalui instruksi ini merumuskan kordinasi lintas sektor yang menjadi dasar penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi. Instruksi Presiden dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2005.

## 5.2 Upaya Rehabilitasi

Rehabilitasi dilaksanakan Pemerintahan SBY setelah menyelesaikan Fase Tanggap Darurat. Rehabilitasi bertujuan mengembalikan dan memulihkan fungsi bangunan dan infrastruktur yang mendesak dilakukan untuk menindaklanjuti tahap tanggap darurat, seperti rehabilitasi masjid, rumah sakit, infrastruktur sosial dasar, serta prasarana dan sarana perekonomian. Sasaran utama dari tahap rehabilitasi ini adalah untuk memperbaiki pelayanan publik hingga pada tingkat yang memadai. Dalam tahap rehabilitasi, juga diupayakan penyelesaian berbagai permasalahan yang terkait dengan aspek hukum melalui penyelesaian hak atas tanah, penyelamatan dokumen pertanahan, dan penanganan trauma korban bencana. Sasaran tahap rehabilitasi yang paling penting dan mencakup rehabilitasi utama adalah pemulihan fungsi pelayanan publik dan penanganan trauma korban. Pemulihan fungsi pelayanan publik dan penanganan trauma bencana akan dijelaskan dibawah ini.

### 5.2.1 Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik

Pemulihan fungsi pelayanan publik sangat diperlukan guna mengembalikan dan menyukseskan proses rekonstruksi yang akan dilaksanakan. Ruang lingkup pelaksanaan rehabilitasi fungsi pelayanan publik dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti pemulihan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah sementara masyarakat, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, serta pemulihan fungsi pemerintahan (BRR, 2005).

Pemulihan lingkungan wilayah Aceh pada tahun 2004 dilakukan setelah tahap tanggap darurat berakhir yaitu pada akhir tahun 2005. Cakupan dalam pemulihan lingkungan fisik meliputi beberapa kegiatan seperti perbaikan lingkungan kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan gedung. Pemulihan perbaikan kawasan permukiman dilakukan secara bertahap. Komponennya antara lain lingkungan udara, lingkungan perairan, lingkungan vegetasi atau yang biasa disebut dengan tanaman, dan juga pada lingkungan sosial.

Dalam pelaksanaannya pemulihan yang pertama terciptanya lingkungan udara yang nyaman.

Lembaga donor luar negeri serta dalam negeri banyak yang memberikan bantuan untuk pelaksanaan pemulihan lingkungan. Lembaga yang membantu dalam proses rehabilitasi salah satunya adalah MDF (*Multi Donor Fund*). MDF berperan strategis dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi proses pemulihan. MDF memberikan bantuan teknis dan bantuan operasional kepada BRR dalam perannya sebagai koordinator program rehabilitasi senilai kurang lebih 7 juta dolar US untuk menyelesaikan mandatnya secara tepat waktu dan terbuka (MDF, 2011). Hal ini mencakup bantuan penyusunan kebijakan, landasan hukum, proyek dan program maupun alat bantu dan sistem pemantauan proses pemulihan sejak Juli 2005 sampai dilanjutkan dengan program rekonstruksi.

Pemulihan awal yang dilakukan MDF adalah dengan memberikan layanan pengiriman yang memungkinkan banyak lembaga yang terlibat dalam pemulihan mengangkut logistik berupa makanan, pakaian, dan obat-obatan ke pantai barat Aceh dan tempat pendaratan terpencil di Pulau Simeulue. Setelah tahap pemulihan awal, dana MDF dialokasikan pada upaya pemulihan infrastruktur dan transportasi. Melalui proyek dari MDF infrastruktur jaringan transportasi daerah yang penting dapat dipulihkan untuk sementara menunggu proses rekonstruksi berjalan. Jalan tersebut adalah Jalan Lamno-Calang yang merupakan jalan penghubung utama di pantai barat (MDF, 2011). Rehabilitasi jalan tersebut sangat penting karena digunakan untuk menyalurkan bantuan logistik dari kantor regional ke setiap wilayah yang ada di kawasan Aceh Jaya.

MDF selain membantu proses rehabilitasi pada bidang transportasi, MDF juga membantu melakukan pemulihan masyarakat wilayah Aceh. Pemulihan masyarakat dilakukan melalui beberapa program kerja dari MDF sendiri. Proyek tersebut adalah PPK atau Program Pengembangan Kecamatan dan Kabupaten. PPK dilaksanakan di 17 kabupaten dan 1 kota yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dana yang di anggarkan untuk program ini sebesar Rp. 4,24 Milyar. Dana tersebut berasal dari MDF yang terdiri beberapa donor bilateral seperti CIDA, AUSAid, Belanda, dan DFID.

MDF bekerja sama dan berkolaborasi dengan beberapa pihak lembaga dalam menuntaskan program PPK atau Program Pengembangan Kecamatan dan Kabupaten. Kerja sama yang dimaksud yaitu kerja sama dengan lembaga ILO, INSPIRIT, dan CIDA dalam melaksanakan pelatihan teknik fasilitasi kepada fasilitator kecamatan dari kabupaten Pidie dan Aceh Jaya. Kolaborasi PPK & NGO lainnya melakukan rehabilitasi di Kabupaten Aceh Besar. Rehabilitasi yang dimaksud adalah dengan CARE yang melakukan pembangunan sanitasi (MCK) di kec. Peukan Bada. AUSAid dengan pembangunan kembali Meunasah & Kantor Desa di 108 desa di 8 kecamatan kategori bencana. MERCY CORPS melakukan pengembangan prasarana Air Bersih. Dibagian wilayah Aceh Utara bekerjasama dengan HELP dalam pembangunan drainase. Dan yang terakhir adalah kolaborasi PPK & NGO yang dilaksanakan di Kabupaten Bireun. Kerjasama dilakukan dengan Child Fund & Water Mission International untuk melaksanakan bantuan instalasi pengolahan air minum di Kecamatan Kutablang dan Juli. Bekerjasama dengan lembaga UMCOR melaksanakan pembangunan drainase di Kecamatan Samalanga & Kuala. Dan bekerjasama dengan GVC Italia yang melaksanakan program Income Generating yang merupakan program pemberdayaan penduduk yang dilaksanakan di Kabupaten Bireun (MDF, 2011).

### 5.2.2 Penanganan Trauma Korban

Tsunami Aceh memberikan dampak salah satunya adalah dampak terhadap mental. Dampak mental bersifat berkelanjutan. Setelah terjadinya bencana, gejala-gejala reaksi stress pasca Trauma atau Post-Traumatic Stress Reactivity (PTSR) seperti merasa mati rasa atau teringat kembali peristiwa Tsunami. Perasaan seperti itu sering dialami oleh orang-orang yang tinggal di wilayah kerusakan paling parah yaitu Aceh Besar, Banda Aceh dan Aceh Jaya. Gejala PTSR yang tinggi juga dilaporkan oleh yang mengalami peristiwa traumatis. Tidak hanya pengalaman yang dialami sendiri yang bisa memicu gejala PTSR, berada dalam komunitas yang mengalami kerusakan parah juga ikut menyebabkan tingginya PTSR. Pemulihan yang dilakukan untuk menangani PSTR ini adalah dengan program intervensi kesehatan mental yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada korban satu persatu

dan menangani segala permasalahan mental para korban (Frankenberg, etc, 2008:1671). Akan tetapi hal tersebut tidak efisien dikarenakan jumlah korban PSTR yang banyak tidak memungkinkan untuk melakukan program ini terus menerus.

Program intervensi kesehatan mental, hanya 7-10% korban yang mendapatkan intervensi semacam itu. Faktor lain yang juga bisa mempercepat pemulihan adalah pendidikan. Walaupun tingkat pendidikan tidak berhubungan dengan resiko mengalami PTSD sesaat setelah terjadinya Tsunami, namun individu yang memiliki pendidikan lebih tinggi melaporkan berkurangnya intensitas gejala PTSD yang lebih cepat dari waktu ke waktu (Frankenberg, etc, 2012:498). Hal tersebut dibuktikan dengan berkurangnya korban PSTR di wilayah Banda Aceh pada tahun 2007. Selain korban PSTR, banyak anak-anak yang kehilangan orang tua selama terjadinya bencana tersebut (Cas, etc, 2014:437).

Pemulihan psikologis dilakukan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi bekerja sama dengan Lembaga-lembaga pemulih seperti Yayasan Pulih (YP). Dari Yayasan Pulih yang terjun ke lapangan adalah tim yang diketuai oleh Jackie Viemilawati. Tim dari Jackie Viemilawati dalam menyelesaikan masalah gangguan kejiwaan pasca bencana adalah dengan pemulihan trauma para korban dengan cara *Trauma Healing*. Cara pemulihan *Trauma Healing* yaitu dengan bantuan berupa dukungan psikososial bagi para korban bencana seperti kegiatan bermain bersama anak-anak dan menggambar, memberikan motivasi dan konseling rutin (Yayasan Pulih & JICA, 2006).

Jackie Viemilawati dan pegiat Yayasan Pulih menetap di Aceh selama tiga tahun untuk memberikan bantuan berupa dukungan psikososial bagi para korban. Jackie dan Yayasan Pulih menggunakan cara kerja pendekatan piramida yaitu dengan mengumpulkan semua korban yang mengalami Gangguan Stres Pasca-Trauma. Selanjutnya akan dilaksanakan intervensi dan dibagi per fase. Intervensi yang dimaksud adalah intervensi mental para korban. Setelah intervensi dilakukan korban akan masuk ke dua fase. Fase pertama adalah pendistribusian makanan dan alat kesehatan, dan fase kedua adalah tenda penampungan.

Selain pendekatan dan Trauma Healing, Endang Moerdopo Kepala Pengembangan dan Evaluasi Pusat Pembelajaran Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh pasca tsunami. Selama 2 (dua) tahun masa tugasnya sebagai seorang pekerja sosial melakukan terapi trauma terhadap korban anak-anak tsunami di wilayah Lhok Nga. Endang Moerdopo melakukan pendampingan dengan memberikan terapi tari pada anak-anak korban bencana. Terapi Tari bersifat rekreatif sehingga dapat membantu seseorang untuk mengekspresikan emosi diri. Melalui terapi tari yang bersifat rehabilitatif ini para pengungsi anak mencapai keseimbangan tubuh dan jiwa, sehingga dapat memperbaiki pandangan hidup dan fungsi mentalnya. Terapi Tari yang dilakukan oleh Endang Moerdopo mempunyai keberhasilan yaitu berkurangnya gangguan stress pascatrauma anak usia sekolah di wilayah Aceh Besar khususnya pada Kecamatan Lhok Nga yang secara intensif Terapi Tari dilaksanakan di wilayah tersebut (Moerdopo, 2009).

### **5.3 Upaya Rekonstruksi**

Rekonstruksi adalah Pembangunan kembali semua sarana dan prasarana serta kelembagaan di Aceh. Sasaran utama tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban. Upaya rekonstruksi bertujuan membangun kembali kawasan kota, desa dan aglomerasi kawasan dengan melibatkan semua masyarakat korban bencana, para pakar, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha (Perka BNPB nomor 11 tahun 2008). Sasaran akhir tahap rekonstruksi adalah terbangunnya kembali kehidupan masyarakat yang lebih baik di wilayah yang terkena bencana. Tahap rekonstruksi wilayah pesisir Aceh dapat dikelompokkan menjadi dua aspek yaitu rekonstruksi dalam bentuk fisik dan rekonstruksi dalam bentuk non fisik.

#### **5.3.1 Rekonstruksi Fisik**

Rencana pembangunan kembali wilayah pesisir Aceh pascabencana alam tsunami diatur dalam Perpres No. 30 Tahun 2005. Perpres tersebut berisi Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam. Pelaksanaannya ditangani oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Nanggroe Aceh Darussalam dan diketuai oleh Kuntoro

Mangkusubroto. Cakupan rekonstruksi diantaranya adalah aspek fisik, aspek hukum, serta pengembalian hak sipil dan martabat masyarakat.

Pembenahan dalam aspek fisik berupa perbaikan kembali fasilitas-fasilitas umum, rumah-rumah bantuan, sekolah-sekolah, dan kantor-kantor pemerintahan. Fasilitas umum yang terkait yaitu pada sektor perhubungan seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandar udara. Pembenahan pada aspek hukum yaitu dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah, hak keperdataan, perwalian, pertanahan, dan perbankan. Pembenahan dalam rekonstruksi tersebut tercantum pada rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kerusakan fasilitas dan infrastruktur dapat dilihat pada *Lampiran 3*.

Rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah ditetapkan sebagai kebijakan umum. Kebijakan umum inilah yang dipergunakan untuk melaksanakan rekonstruksi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kebijakan tersebut diarahkan untuk membangun kembali masyarakat, membangun kembali perekonomian, membangun kembali infrastruktur, dan membangun kembali pemerintahan. Secara khusus, kebijakan untuk tahun 2007 telah ditargetkan untuk penyelesaian pembangunan perumahan sebanyak 41.000 unit rumah sehingga seluruh pengungsi dapat dipindahkan dari tenda dan hunian sementara ke rumah yang layak huni. Di samping itu, penyelesaian pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalan, jembatan, pelabuhan laut dan udara, yang dapat mendukung proses rekonstruksi dan penyaluran logistic terus dilanjutkan seperti contoh pembangunan ruas jalan dari Kabupaten Aceh Jaya ke Kabupaten Aceh Barat. Ruas jalan strategis yang menjadikan tersambungannya perhubungan di sepanjang pantai barat. Pada akhir tahapan ini pada tahun 2007 masa penanggulangan darurat yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur sudah selesai dan selanjutnya akan diserahkan ke Pemerintahan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk diteruskan membangun wilayah Aceh (Perpres No. 30 Tahun 2005).

Pembangunan infrastruktur fisik serta infrastruktur jalan transportasi dan perumahan BRR dibantu oleh beberapa pihak lembaga donor luar negeri salah satunya adalah MDF. Anggaran yang diberikan MDF untuk alokasi pembangunan

infrastruktur wilayah Aceh sebesar 245 juta US dollar. Dari dana yang masuk hasil rekontruksi yang diperoleh adalah 20.000 unit rumah, 100 unit sekolah, 110 bangunan kantor desa, dan 775 unit Jembatan. Selain hasil rekontruksi tersebut, MDF juga melakukan upaya rekontruksi pelabuhan. Pelabuhan adalah bagian yang penting guna melakukan pengiriman barang dan logistik yang diperlukan untuk proses rekontruksi.

Program tersebut dinamakan TRPRP atau Program Rekonstruksi Pelabuhan dirancang sesuai dengan strategi pembangunan kembali pelabuhan secara keseluruhan yang didukung oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (BRR). Pelabuhan yang dibangun adalah Pelabuhan Calang dan Sinabang. Pelabuhan tersebut dibangun karena berada di wilayah bencana yang memiliki dampak terparah bahkan kondisi dari kedua pelabuhan tidak dapat berfungsi dikarenakan dermaga kedua pelabuhan tersebut hancur. Pelabuhan ini di rekontruksi dikarenakan tempatnya yang strategis guna penyaluran bantuan logistik ke wilayah barat dan selatan Aceh. Dana yang digunakan untuk penyelesaian pelabuhan ini mencapai 3,78 juta US dollar. Bersamaan dengan MDF membangun Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi juga melakukan beberapa prioritas kerja antara lain penyelesaian program perumahan, melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan aspek ekonomi berkelanjutan, dan pembentukan sekretariat bersama.

Program penyelesaian perumahan dan pemukiman mencapai satu trilyun rupiah yang didistribusikan untuk rumah dan pembangunan prasarana dasar. Pembinaan dalam aspek fisik yang berupa perbaikan-perbaikan perumahan dan pemukiman. Infrastruktur yang dibangun oleh BRR sejumlah 8.947 unit rumah yang berada di Kota Banda Aceh dari jumlah 41.734 unit rumah yang dibangun di seluruh wilayah pesisir Aceh seperti Aceh Jaya, Aceh Barat, Sabang, Pidie, Lhokseumawe, Singkil, Aceh Selatan, dan Langsa sampai tahun 2006. Pembangunan perumahan dan infrastruktur dasar di wilayah Banda Aceh selesai pada bulan April tahun 2006 dapat dilihat dari data sebagai berikut.

Tabel 5.2 Data Pembangunan Sektor Perumahan dan Infrastruktur Dasar pada tahun 2005 sampai 2006

Sektor	Oktober 2005	April 2006
Perumahan	8.947 unit	41.734 unit
Fasilitas Ibadah	141 unit	489 unit
Fasilitas Kesehatan	38 unit	113 unit
Jalan	-	490 km
Jembatan	-	41

Sumber: BRR, 2007

Sasaran selanjutnya adalah rekonstruksi pada aspek pembangunan ekonomi berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan membangun kembali wilayah Aceh. Pelaksanaannya dengan cara memajukan dan memanfaatkan komoditas yang ada di wilayah yang terkena dampak tsunami, seperti wilayah Aceh Barat. Komoditas tanaman perkebunan pada tingkat petani seperti karet, kakao dan kelapa adalah rendah peningkatannya. Dibangun pabrik karet (*crumb rubber*) di wilayah Aceh Barat diharapkan dapat meningkatkan harga karet di tingkat petani. ICRAF melalui Program Nursery of Excellence bersama dengan LSM lokal membangun pembibitan di masyarakat. Pelatihan untuk petani baik laki-laki maupun perempuan dan dilakukan mulai dari menanam hingga memanen. Pada akhir program, 56 pabrik karet telah dibangun dan 5.542 orang telah dilatih di wilayah Aceh Barat (ICRAF, 2012).

Terakhir adalah program penguatan regionalisasi dan pembentukan sekretariat bersama. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jalinan kerjasama antar lembaga donor dan BRR. Selain itu, program ini juga memudahkan penyaluran bantuan dan memantau pelaksanaannya dari satu daerah ke daerah lain. Kantor regional yang pertama kali dibangun hanya pada 8 wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu pada wilayah Banda Aceh, Calang, Meulabuh, Kutacana, Langsa, Lhokseumawe, Singkil, Sinabang. Kantor regional berada

langsung dibawah pimpinan Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR, 2006). Untuk lebih jelas lihat di *Lampiran 2*. Tugas dari kantor regional adalah sebagai koordinator dan pelaksana proyek-proyek Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi dan Lembaga Donor di daerah-daerah. Pendirian kantor regional ini membuat Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi cepat dan terstruktur dalam pelaksanaan proyek-proyek rekontruksi.

### 5.3.2 Rekontruksi Non Fisik

Rekonstruksi non fisik yang dimaksud adalah tindakan untuk memperbaiki atau memulihkan kegiatan pelayanan publik dan kegiatan sosial, ekonomi serta kehidupan masyarakat. Cakupan dalam kegiatan rekonstruksi non-fisik diantaranya adalah (1) kegiatan pemulihan layanan yang berhubungan dengan pendidikan serta kehidupan sosial dan budaya masyarakat, (2) partisipasi dan peran serta lembaga atau organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat, (3) kegiatan pemulihan kegiatan perekonomian masyarakat, dan (4) fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya dilakukan dibawah koordinasi BNPB dengan bekerja-sama dengan instansi-instansi yang terkait dengan bidang yang akan di rekontruksi (Perka BNPB, 2008:57). Rekontruksi non-fisik yang pertama adalah pada bidang pendidikan. Di bidang pendidikan komponen rekontruksi diantaranya adalah penyediaan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum terutama terkait dengan kebencanaan dan upaya pengurangan risiko bencana, serta kegiatan belajar mengajar.

Tsunami Aceh pada tahun 2004 tidak hanya menghancurkan bangunan sekolah tetapi juga menewaskan puluhan ribu siswa dan guru di Aceh. Sekitar ada 2000 gedung sekolah rusak dan 2500 tenaga pendidik meninggal dunia (BRR, 2005). Lembaga-lembaga yang membantu untuk merekontruksi sektor pendidikan di Aceh adalah BRR dengan dibantu badan dari PBB yaitu UN Agencies (BRR, 2006). Keduanya menyelesaikan 335 sekolah baru dan lebih dari 1.100 guru baru atau temporer mendapat pelatihan, dan 1,7 juta buah buku teks telah didistribusikan di seluruh wilayah Aceh yang terkena dampak tsunami (BRR, 2005).

Dalam bidang perekonomian komponen yang dibangun adalah perdagangan pasar tradisional. Pembangunan pasar tradisional di wilayah pesisir Aceh dilaksanakan guna mengembalikan mata pencaharian masyarakat wilayah Aceh. Melalui program PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dibangun pasar tingkat desa sebanyak 26 unit yang tersebar di beberapa wilayah seperti Banda Aceh, Aceh Jaya, Aceh Besar, Pidie dan Aceh Barat. Pembangunan pasar tingkat desa ini menghabiskan anggaran dana sebanyak Rp. 6,5 Triliun yang berasal dari Kementerian Perdagangan dengan dibantu Bank Dunia (MDF, 2011).

Dalam rekonstruksi perekonomian masyarakat pesisir Aceh terdapat hambatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat Aceh selama masa rekonstruksi yaitu tingginya tingkat kredit seret (Priharnowo, 2005). Kredit seret terjadi karena masyarakat pesisir Aceh memiliki sejumlah hutang kredit sedangkan harta bendanya telah habis hanyut dibawa oleh gelombang tsunami sehingga tidak dapat membayar kredit bank yang menjadi tanggungannya (Priharnowo, 2005).

Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini dibantu oleh lembaga PBB yaitu UNDP. UNDP adalah lembaga PBB yang memegang mandat untuk melakukan upaya-upaya perbaikan ekonomi masyarakat, baik melaksanakan koordinasi terhadap NGO/LSM yang ada program mata pencarian ataupun lewat NGO dan LSM yang ada. UNDP melaksanakan program Livelihood dalam upaya mengembalikan perekonomian di wilayah Aceh. Kegiatan Livelihood dilakukan dengan membersihkan Pasar Bina Usaha dan memberikan bantuan tenda ke para pedagang. UNDP dibantu dengan Spanish Red Cross melakukan penyediaan bibit dan pelatihan di bidang pertanian, pengolahan pertanian, dan Industri kecil. Selain itu, upaya lain dalam mengembalikan perekonomian Aceh adalah dengan memberikan modal usaha kepada koperasi yang ada di wilayah Aceh untuk permodalan awal seperti pada wilayah Aceh Barat. Pada wilayah Aceh Barat masyarakat sudah dapat berjualan hasil pertaniannya dengan modal awal dari pinjaman koperasi (Dadek, 2017:137).

Di bidang pelayanan kesehatan. Komponen dari rekonstruksi non fisik antara lain penyediaan tenaga medis dan non medis, penyediaan pasokan obat dan peralatan medis. Dalam penyediaan tenaga medis dan non medis BRR meminta

bantuan kepada Kementerian Kesehatan RI dan WHO. Selanjutnya Depkes bersama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengkoordinir para relawan kesehatan baik dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam dan luar negeri maupun dari berbagai provinsi di Indonesia untuk membantu pelayanan kesehatan di provinsi NAD. Untuk penyediaan pasokan obat dan peralatan medis Depkes dan WHO mengirimkan bantuan berupa semua jenis obat-obatan dalam setiap paket yang berisi 120 item obat sesuai standar WHO (Kemkes, 2005).

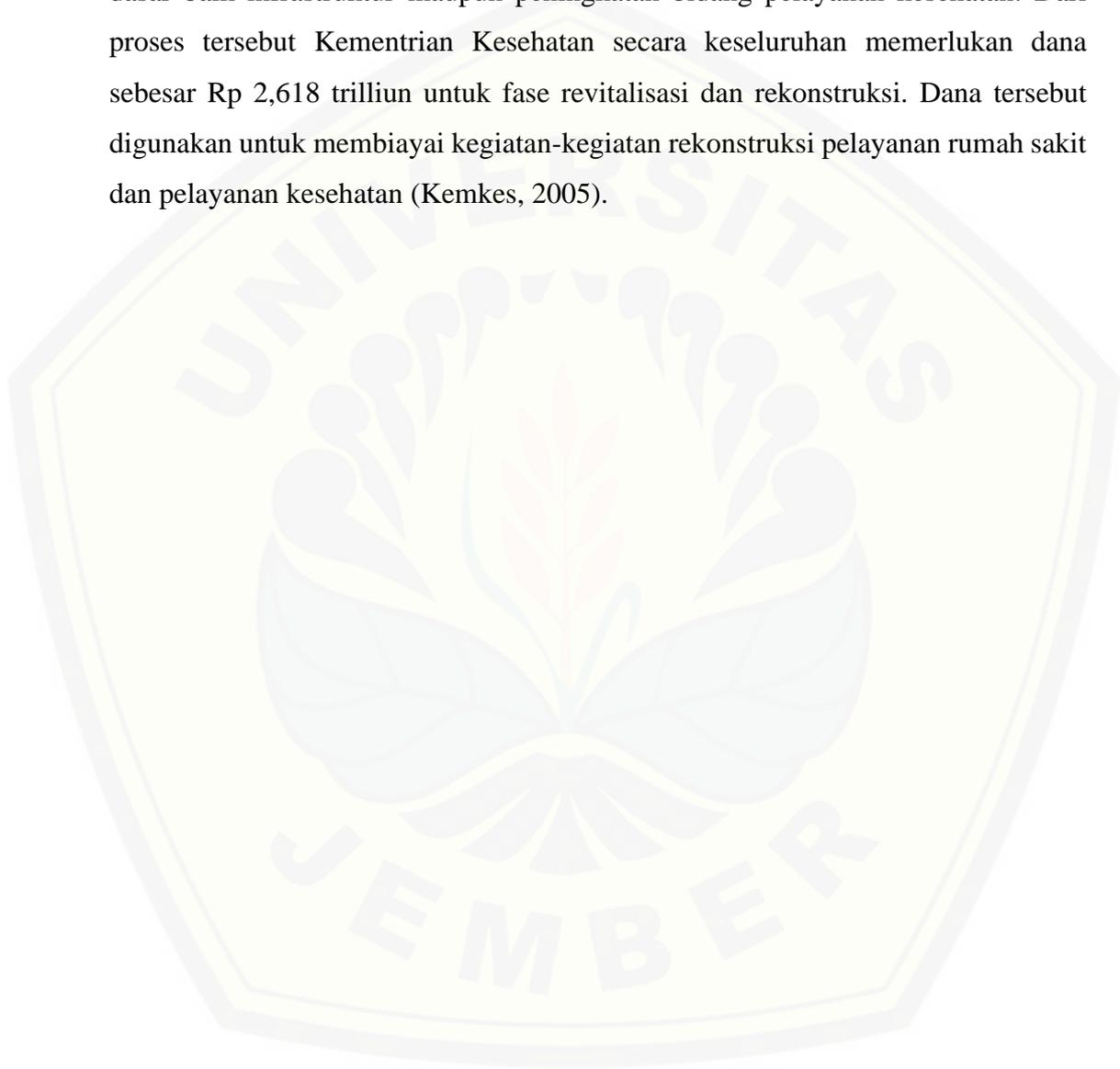
Tujuan dari rekonstruksi non fisik ini adalah semua pelayanan kesehatan berfungsi kembali dengan lancar seperti semula. Keberhasilan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain angka kematian lebih rendah dari 1 per 10.000 per hari dan tidak terjadinya outbreak atau kejadian luar biasa (KLB) berbagai penyakit seperti malaria, demam berdarah dengue (DBD), Campak, Cholera dan Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) pasca terjadinya tsunami. Padahal untuk dampak bencana alam tsunami menurut parameter internasional, angka kematiannya bisa ditolerir lebih dari 1 per 10.000 orang per hari (Kemkes, 2005).

Kementrian kesehatan dalam memberdayakan Dinas Kesehatan melakukan revitalisasi di Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie dan Aceh Jaya yang terkena dampak paling parah. Dana revitalisasi dibantu dana APBN, APBD dan Lembaga Donor (Kemkes, 2005). Sedangkan untuk kawasan Timur, dari Sigli sampai Aceh Timur, pelayanan kesehatan relatif bisa ditangani Dinas Kesehatan Kabupaten dan rumah sakit setempat dengan bantuan dari Dinkes Jatim, Jateng, Sumut, Jambi dan Riau (Thomas, 2008:1672).

Kementerian kesehatan melakukan penguatan pendampingan dan memberikan bantuan fasilitas agar organisasi yang ada dapat berfungsi dengan baik, staf bisa masuk dan dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik (BRR, 2005). Selain melakukan pendampingan, penguatan dan membantu fasilitas Dinas Kesehatan, Wakil Kementrian kesehatan di Banda Aceh dan Kepala Dinas kesehatan Provinsi NAD juga mengkoordinasikan 65 tim kesehatan internasional dan 96 tim kesehatan Nasional (Kemkes, 2005).

Kementerian kesehatan mempunyai pedoman berupa Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana dan Tsunami di

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kebijakan yang dimaksud masuk dalam *Rapid Assessment* yang dilakukan Kementerian Kesehatan. Hal tersebut meliputi *damage assessment, lost assessment dan need assessment*. Kinerja kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut pertama mengidentifikasi berapa kebutuhan dasar baik infrastruktur maupun peningkatan bidang pelayanan kesehatan. Dari proses tersebut Kementerian Kesehatan secara keseluruhan memerlukan dana sebesar Rp 2,618 triliun untuk fase revitalisasi dan rekonstruksi. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan rekonstruksi pelayanan rumah sakit dan pelayanan kesehatan (Kemkes, 2005).



**BAB 6. HAMBATAN YANG DIHADAPI PEMERINTAHAN SUSILO  
BAMBANG YUDHOYONO DALAM PENANGANAN  
TSUNAMI ACEH TAHUN 2004**

Setiap pelaksanaan kebijakan yang diterapkan tidak selalu sesuai dengan harapan yang direncanakan. Pelaksanaan upaya tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Aceh mengalami banyak permasalahan baik internal dan di lapangan. Hambatan internal yang terjadi yaitu hubungan antara lembaga donor dan BRR tidak kompak. Hal tersebut menjadi hambatan dikarenakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan dana yang tidak sedikit. Pamor korupsi Indonesia mengakibatkan lembaga donor luar negeri tidak percaya untuk menyerahkan bantuannya kepada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR).

Hambatan yang kedua dari lapangan yaitu kerusakan di bidang transportasi. Kerusakan ini menimbulkan banyak permasalahan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Sarana transportasi menjadi hal penting dalam proses penanggulangan bencana. Transportasi dibutuhkan agar barang logistik maupun barang keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat sampai dengan cepat. Permasalahan bidang transportasi disini adalah banyak jalan utama yang menghubungkan satu wilayah ke wilayah lain hancur dan tidak dapat dilewati kendaraan. Selain sektor darat, pada sektor transportasi laut banyak pelabuhan rusak parah dan mengakibatkan kapal tidak dapat mendaratkan barang-barang logistik secara cepat. Kerusakan tersebut menjadikan barang logistik dan keperluan lain didaratkan menggunakan jalur udara. Walaupun begitu, pendaratan hanya dapat dilakukan menggunakan helikopter. Kedua hambatan diatas harus diselesaikan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan serta dituntaskan dengan cepat. Penyelesaian kedua hambatan tersebut akan dijelaskan secara rinci dibawah ini.

**6.1 Ketidakpercayaan Pihak Asing (Lembaga Donor) Terhadap BRR**

Berakhirnya Fase Tanggap Darurat pada bulan Maret tahun 2005 pemerintah Indonesia menugaskan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) untuk mengkoordinasikan proses rencana rehabilitasi dan

rekonstruksi di Aceh. Dalam master plan yang dibuat, diidentifikasi bahwa perlu adanya sebuah badan yang bertanggung jawab sebagai koordinator proses rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Aceh pada 15 April tahun 2005. Master Plan diatur secara hukum, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang (Perpu) yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 30/2005 oleh Presiden Indonesia. Pada hari yang sama, Presiden Indonesia mendeklarasikan pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dengan ketua pelaksana yaitu Kuntoro Mangkusubroto (BRR, 2005).

Tugas yang diemban oleh BRR merupakan hal yang baru bagi penanggulangan bencana alam. BRR sebagai koordinator dan pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dipimpin setingkat Menteri mendapatkan untuk menyelesaikan Tahap Tanggap Darurat, Tahap Rehabilitasi, dan Tahap Rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi tidak memiliki panduan atau contoh sebelumnya karena badan ini adalah badan baru dalam sistem penanggulangan bencana alam di Indonesia. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan setiap proses penanggulangan bencana alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam begitu juga alokasi anggaran dana yang masuk baik dari dalam negeri maupun luar negeri (BRR, 2005).

Hambatan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah kepercayaan pihak lembaga donor luar negeri dengan pengelolaan anggaran yang akan digunakan untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Di dunia internasional, Indonesia memiliki reputasi sebagai negara dengan tingkat korupsi yang tinggi dibuktikan dengan berada pada urutan ke 133 dari 145 negara dalam *Transparency International's 2004 Corruption Perception Index*. Ditambah lagi pada Januari tahun 2005 terjadi kasus penggelapan bantuan tsunami mencapai 7 Milliar Rupiah yang dilakukan oleh Koordinator Government Watch (Gowa) Farid Rasyid Faqih. Farid menimbun sejumlah bantuan di sebuah gudang milik Badan Urusan Logistik (Bulog) di kawasan Lambaro, Banda Aceh. Barang milik pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat Pangan untuk Rakyat Miskin (PaRam) dan Sekolah Rakyat

Miskin (SRM) itu disimpan di bagian depan gudang. Sementara di bagian dalam, tersimpan barang bantuan PBB (Liputan6.com, 2005).

Hal tersebut membuat pihak donor tidak percaya bahwa BRR akan menyalurkan dana bantuan tanpa korupsi. Bukti dari hal tersebut adalah setelah pembentukan BRR, pihak lembaga donor dari MDF masih mengelola bantuan tanpa diserahkan ke pihak BRR (MDF, 2011). Ketidakpercayaan inilah yang menjadi penghambat proses rehabilitasi karena BRR dan Lembaga Donor luar negeri tidak 100 persen bekerjasama untuk melaksanakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi mengambil kebijakan cepat guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Kebijakan tersebut ialah dengan mendirikan badan anti korupsi atau SAK (Satuan Anti Korupsi) dan melakukan pertemuan rutin dengan lembaga donor yang dinamakan CFAN (*Coordination Forum for Aceh and Nias*). SAK didirikan dibawah pimpinan BRR dan memiliki kewenangan khusus serta bekerjasama dengan KPK pusat. Setelah SAK didirikan dan mulai bekerja pihak BRR mengadakan tur anti korupsi di 21 Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh. Hal tersebut dilakukan guna memberantas korupsi dari tingkat daerah. Posisi SAK selanjutnya diperkuat dengan menyerahkan SAK dari pengawasan BRR ke Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain SAK atau Satuan Anti Korupsi, kebijakan untuk membuat lembaga donor percaya dan mau bekerjasama 100 persen adalah dengan mengadakan CFAN (*Coordination Forum for Aceh and Nias*). CFAN pertama dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2005 yang mengumpulkan semua lembaga donor dan membahas transparansi kegiatan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Dan setelah pelaksanaan CFAN pertama berjalan lancar dan diikuti semua perwakilan lembaga donor BRR melaksanakan CFAN lanjutan yaitu CFAN kedua dilaksanakan di luar negeri yang bertujuan untuk lebih mempererat hubungan dengan negara lembaga donor (BRR, 2008). Dari CFAN kedua kepercayaan lembaga donor mulai meningkat dengan bukti MDF yang sebelumnya tidak menyerahkan anggaran dana sepenuhnya ke BRR mulai bekerjasama dengan baik dengan menyerahkan bantuan anggaran dan yang dikelola oleh BRR dengan bantuan personil tim dari MDF (MDF, 2011).

Kepercayaan pihak lembaga donor terhadap BRR atau Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi semakin membaik. Hal tersebut terbukti dari lembaga donor menyumbangkan total bantuan sebesar 7,2 Milyar US dollar yang diserahkan ke BRR untuk dikelola untuk anggaran dana rehabilitasi dan rekonstruksi. (BRR, 2008). Pihak lembaga donor memberikan dana dengan satu persyaratan yaitu pihak BRR harus melaporkan setiap pengeluaran dan pemasukan secara transparan. Hal tersebut yang menjadikan CFAN tempat untuk melaporkan setiap kegiatan BRR ke pihak lembaga donor. Hal tersebut diimplikasikan pada CFAN ketiga yang dilaksanakan bulan April 2007 yang membahas tentang Paparan Tinjauan Paro-Waktu (*Mid-Term Review, MTR*) mengenai kemajuan aktivitas pemulihan sejak April 2005 hingga April 2007 (BRR, 2008). Dua kebijakan yang diambil BRR inilah yang menjadikan hambatan ketidakpercayaan pihak asing hilang dan dapat bekerjasama dengan baik untuk melaksanakan program-program rehabilitasi dan rekonstruksi bersama-sama.

## **6.2 Hambatan Sarana Transportasi**

Tsunami Aceh pada tahun 2004 menyebabkan hancurnya infrastruktur seperti jalan, jembatan, terbatasnya kapasitas alat angkut, dan bandara. Kerusakan tersebut serta terpelecehnya daerah yang dituju menyebabkan tidak maksimalnya proses penanggulangan bencana (Hambali, 2004). Kerusakan infrastruktur dapat dilihat di *Lampiran 3*. Proses penanggulangan bencana terhambat karena kerusakan infrastruktur vital tersebut dikarenakan pengiriman logistik dan barang-barang yang diperlukan untuk penanggulangan bencana membutuhkan sarana transportasi baik darat maupun laut.

Hambatan tersebut diatasi dengan cara membangun sarana transportasi yang rusak baik untuk sementara maupun untuk jangka Panjang. Pembangunan sarana transportasi dibantu oleh beberapa lembaga donor salah satunya adalah MDF. MDF mengaokasikan 35% dananya untuk perbaikan bidang infrastruktur. Dana anggaran yang dikeluarkan dalam pembangunan sarana transportasi sebesar 100 juta US dollar. Dana tersebut dipergunakan untuk pembangunan jalan rusak dan pelabuhan. MDF menerima tambahan dana dari IRFF sebesar 37 juta US dollar

yang dialokasikan untuk guna membangun jalan. Pembangunan jalan tersebut merupakan ruas jalan penting sepanjang 50 km dari Kabupaten Aceh Jaya ke Kabupaten Aceh Barat. Ruas jalan ini menjadikan tersambungannya perhubungan di sepanjang pantai barat Aceh. Jalan Pantai Barat tersebut dapat memberikan manfaat terhadap mata pencaharian dan kemudahan untuk memperoleh layanan dasar bagi lebih dari 900.000 jiwa penduduk, mengurangi biaya transportasi, dan memperbesar peluang ekonomi (MDF, 2011).

Selain jalan pantai barat, jalan yang menjadi sarana transportasi utama untuk dibenahi adalah ruas jalan Lamno dan Calang. Ruas jalan antara Lamno dan Calang berada dalam kondisi yang tidak layak mengakibatkan truk dengan beban berlebih tidak dapat melewati rute ini. Selain itu kurangnya pemeliharaan sering membuat jalan tidak dapat dilalui kendaraan, terutama pada musim hujan. MDF membangun ruas jalan antara Lamno sampai Calang. Anggaran yang dihabiskan MDF untuk membangun ruas jalan ini sebesar 1,46 juta US dollar (MDF, 2011). Dengan terbangunnya ruas jalan ini menjadikan akses yang lebih baik ke jalan pantai bagi desa-desa yang terletak jauh dari jalan pantai, serta menyediakan alternatif rute yang lebih pendek untuk mencapai Calang.

Selain sarana transportasi darat penanganan hambatan juga dilakukan pada transportasi laut. MDF melalui Program SLDP atau *Program Angkutan dan Logistik Laut* untuk memenuhi kebutuhan logistik seperti barang, makanan, dan alat-alat selama rekonstruksi serta mendukung pengangkutan bahan rekonstruksi dan muatan lainnya ke daerah bencana, termasuk daerah terpencil seperti daerah Simeulue. Sejak tahun 2005 program SDLP menyediakan layanan pengangkutan lengkap dengan tujuan utama mengoordinasikan transportasi dan pengiriman bahan rekonstruksi. Setelah pengiriman barang dialihkan ke sektor komersial, proyek berfokus pada penyediaan dukungan logistik dan pembangunan kapasitas untuk pengelolaan pelabuhan yang lebih efektif. Program ini mendapatkan anggaran sebesar 25,03 juta US dollar untuk melaksanakan tugasnya. Capaian yang telah dihasilkan dari program ini adalah pengangkutan barang yang diperlukan untuk rekonstruksi tsunami ke daerah terpencil di seluruh daerah Simeulue yang mengangkut 98.185 metrik ton/256.006 m<sup>3</sup> muatan bantuan (MDF, 2011).

Pada sektor laut pelabuhan-pelabuhan yang rusak juga ikut direhabilitasi sementara agar dapat digunakan untuk mendaratkan bantuan logistik maupun barang yang digunakan untuk proses rehabilitasi ataupun rekonstruksi. Pelabuhan yang di rehabilitasi sementara adalah Pelabuhan Sabang serta pembangunan dermaga sementara di Calang dan Sinabang. Pelabuhan-pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan yang strategis untuk dijadikan tempat pendaratan bantuan melalui jalur laut. Anggaran yang digunakan untuk merehabilitasi sementara sebesar 3, 78 juta US dollar (MDF, 2011). Pembangunan tersebut dikoordinasikan dengan BRR dengan bantuan UNDP, dinas perhubungan provinsi dan kabupaten, dan Ditjen Perhubungan Laut, serta melengkapi upaya yang dilakukan di pelabuhan Aceh lainnya. Kegiatan juga didasarkan pada konsultasi dengan masyarakat dan perwakilan nelayan setempat, serta pemangku kepentingan lain yang berhubungan dengan laut (BRR, 2008).

Hambatan pada bidang sarana transportasi merupakan bagian yang penting untuk cepat diselesaikan. Hal tersebut dikarenakan sarana transportasi baik darat maupun laut digunakan untuk menyalurkan bantuan logistic maupun yang lainnya. Penyaluran tidak selalu mengandalkan transportasi udara dikarenakan banyaknya bantuan yang harus segera disalurkan. Pembangunan secara berkala menjadi penyelesaian masalah. Dimana merehabilitasi bagian jalan dan pelabuhan yang strategis agar bantuan yang akan disalurkan tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran.

**BAB 7. DAMPAK PENANGANAN TSUNAMI ACEH TAHUN 2004 TERHADAP  
PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO  
DAN RAKYAT ACEH**

Dampak penanganan peristiwa tsunami berdampak pada beberapa aspek. Dampak yang paling menonjol dari penanganan Pemerintahan SBY adalah citra dari pemerintahan dan juga rakyat Aceh yang merupakan subjek pada penanganan tsunami Aceh tahun 2004. Pertama, dampak terhadap Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono adalah munculnya peraturan perundang-undangan dan badan khusus untuk menangani permasalahan penanggulangan bencana alam. Hal tersebut menjadi keuntungan untuk Pemerintahan SBY karena pada tahun berikutnya peraturan yang dibuat untuk menangani Tsunami Aceh dipergunakan untuk menangani bencana alam yang terjadi setelah terjadi peristiwa Tsunami Aceh. Kedua, dampak terhadap rakyat Aceh adalah di bidang perekonomian masyarakat. Pada bidang perekonomian pasca penanganan masih belum membaik dan masih banyak krisis ekonomi terjadi di setiap wilayah. Hal tersebut mengakibatkan banyak penduduk Aceh yang melakukan migrasi keluar wilayah Aceh. Untuk lebih jelasnya kedua dampak diatas akan dijelaskan dibawah ini.

**7.1 Dampak terhadap Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono**

Penanganan tsunami tahun 2004 memberikan dampak dan pembelajaran yang signifikan bagi Pemerintahan SBY. Bencana alam yang mengakibatkan kurang lebih ratusan ribu korban jiwa, kerugian ratusan miliar rupiah, serta kerusakan struktur dan infrastruktur pemerintah daerah yang parah. Pada tanggal terjadinya Tsunami yaitu pada tanggal 26 Desember 2004 SBY sedang berada di Papua setelah memberi bantuan korban gempa di Nabire Papua. Sementara itu informasi tentang kondisi Aceh pada saat itu sangat minim sekali, sedikit demi sedikit namun kualitasnya tidak jelas dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya, karena lebih banyak bersifat perkiraan, dan setiap informasi baru selalu lebih buruk dari informasi sebelumnya (Dino, 2008:2).

Pada saat terjadinya tsunami Indonesia tidak memiliki persiapan ataupun Undang-undang yang mengatur tentang penanggulangan bencana alam. Semua aturan perundang-undangan penanggulangan bencana alam dibuat pada saat setelah terjadinya tsunami aceh tahun 2004. Pemerintah SBY dituntut untuk membuat terobosan guna menyelesaikan permasalahan yang ada di Aceh pada saat itu dan membuat kebijakan-kebijakan baru mengenai penanggulangan bencana alam. Dari penanganan Pemerintahan SBY terdapat beberapa keberhasilan.

Pertama, mengalokasikan sumberdaya untuk mitigasi risiko dan kesiapsiagaan bencana adalah investasi penting bagi sebuah negara. Sejak bencana di Aceh, sebuah sistem peringatan dini yang canggih telah dikembangkan dengan biaya lebih dari 400 juta US dollar yang digunakan oleh lebih dari 28 negara. Dengan 101 alat pengukur ketinggian permukaan laut, 148 seismometer, dan 9 pelampung, Sistem Peringatan Dini Tsunami Samudera Hindia bisa mengirim peringatan kepada pusat kendali tsunami di berbagai negara dalam waktu sepuluh menit sejak sebuah gempa terjadi. Pemerintah SBY telah meningkatkan kemampuan manajemen dan kesiapsiagaan bencana, dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang sekarang menjadi sebuah institusi nasional (Perpres, 2008).

Kedua, membangun koordinasi antar institusi dan mekanisme pendanaan. Di awal periode setelah tsunami terjadi, situasi menjadi tantangan besar bagi institusi dan tata kelola pemerintah. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah SBY segera membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan mandat yang kuat untuk menetapkan prioritas dan melakukan koordinasi. Tindakan ini memastikan dana sesuai dengan kebutuhan, tapi juga sejalan dengan praktik global yang baik untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi (BRR, 2005).

Ketiga adalah perlunya menempatkan masyarakat sebagai pusat proses rekonstruksi. Di Aceh, rekonstruksi dipimpin langsung oleh masyarakat melalui proses partisipatoris pemetaan risiko, perencanaan investasi lokal, serta rekonstruksi rumah yang ditentukan oleh pemiliknya. Proses pemberdayaan seperti ini membuat masyarakat bangkit kembali, dan dalam jangka panjang menjadi

semakin kuat dan aman. Besarnya korban manusia dan kerusakan mengancam kemajuan ekonomi yang telah dicapai selama puluhan tahun. Dengan menempatkan masyarakat sebagai pusat perencanaan dan implementasi proses rekonstruksi, masyarakat merasa puas, punya rasa memiliki yang kuat dan dengan hasil yang bahkan lebih baik (BRR, 2008).

Selain keberhasilan diatas, Pemerintah SBY juga mengeluarkan landasan-landasan yuridis tentang penanggulangan bencana alam. Landasan yuridis tersebut seperti Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selain mengeluarkan landasan yuridis Pemerintah SBY juga memberikan acuan gambaran untuk pemerintah selanjutnya untuk penetapan status bencana nasional yang dicantumkan dalam Undang-undang nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana alam. Dampak dari penanganan tsunami diatas juga berguna untuk Pemerintahan SBY untuk digunakan menghadapi bencana alam yang lain seperti Letusan Gunung Kelud pada tahun 2014. Pemerintahan SBY tidak kebingungan seperti awal pertama kali menangani tsunami. Penanggulangan bencana alam diserahkan ke BNPB untuk melakukan koordinasi. Dan untuk regulasi mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 24 Tahun 2007. Letusan Gunung Kelud tidak dijadikan statusnya menjadi status bencana nasional karena tidak memenuhi syarat yang sudah diatur di UU Nomor 24 Tahun 2007. Jadi aturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan SBY pada saat melakukan penanganan Tsunami Aceh memberi kemudahan dan memperlancar proses penanggulangan bencana alam di masa yang akan datang.

## **7.2 Kondisi Rakyat Aceh Pasca Rehabilitasi dan Rekontruksi**

Penanganan Tsunami Aceh tahun 2004 berdampak pada rakyat pesisir Aceh yang terkena dampak tsunami. Perubahan terjadi dari bidang ekonomi masyarakat Aceh. Tingkat kemiskinan di Aceh sebelum tsunami terjadi sebesar 28,5 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2004 yaitu sejumlah 1,2 juta orang, jauh lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan nasional Indonesia sebesar 16,7 persen. Kemiskinan

di Aceh meningkat pasca bencana tsunami mencapai 32,6 persen yaitu pada tahun 2005 sejumlah 1,3 juta orang. Sedangkan pengangguran pasca terjadinya tsunami mengalami kenaikan mencapai 12 persen dari jumlah 2.000 orang menjadi 2.240 orang (World Bank, 2008: 8).

Perekonomian Aceh tumbuh hanya sebesar 2 persen di tahun 2006. Pola pertumbuhan ekonomi Aceh saat ini bukan merupakan pertumbuhan yang berkesinambungan. Pertumbuhannya terutama didorong oleh sektor-sektor yang terkait erat dengan pekerjaan dan dana rekonstruksi yang besar, seperti bangunan, transportasi, dan jasa. Sementara sektor-sektor seperti pekerjaan tidak mengalami kemajuan. Pola pertumbuhan ini tercermin dalam pasar tenaga kerja, dengan lapangan pekerjaan yang tercipta terutama di bidang konstruksi, transportasi, dan jasa, sementara sektor-sektor pertumbuhan penduduk tetap tidak mampu menyerap laju tenaga kerja yang meningkat.

Revitalisasi pertanian menjadi usaha pengurangan kemiskinan. Dari 30 persen penduduk pedesaan di Aceh mempunyai pekerjaan pertanian. Pada sektor pertanian pasca terjadinya tsunami mengalami kemajuan dengan dibantu rehabilitasi dari lembaga donor. Strategi untuk pertumbuhan pertanian perlu memperhatikan risiko lingkungan yang potensial terkait dengan konversi lahan dalam konteks lokal dan harus dipusatkan untuk meningkatkan produksi di daerah-daerah sudah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian seperti Pidie, Kabupaten Aceh Jaya dan Aceh Barat (World Bank, 2008: 31).

Perekonomian Aceh yang tidak dapat stabil serta mengalami krisis ekonomi mengakibatkan banyaknya penduduk yang melakukan migrasi. Dilihat dari migrasi keluar Aceh sebelum dan sesudah tsunami, migrasi keluar paling besar menuju ke Provinsi Sumatra Utara. Alasan rakyat Aceh melakukan migrasi ke Sumatera Utara adalah karena provinsi ini merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh. Ada beberapa perubahan alasan dalam perpindahan penduduk Aceh ke Sumatra Utara setelah tsunami yaitu alasan pendidikan sebesar 4,8%. Sementara alasan keamanan yang mengalami penurunan terbesar setelah tsunami yaitu mencapai 13,3% dan alasan mencari pekerjaan sebesar 6.6% (Mahdi, 2007). Pola migrasi internal berubah sebagai akibat dari tsunami. Selama masa konflik, banyak

orang meninggalkan pedalaman pedesaan yang terkena dampak konflik dan pindah ke kota-kota yang lebih aman di lepas pantai. Setelah tsunami, mereka melarikan diri dari kehancuran akibat tsunami dengan pulang kembali ke daerah asal, terutama Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur (Mahdi, 2007).



## BAB 8. PENUTUP

### 8.1 Simpulan

Tsunami Aceh merupakan salah satu bencana alam yang terjadi di periode Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Latar belakang penetapan status bencana alam Tsunami Aceh tahun 2004 menjadi bencana nasional meliputi beberapa kriteria penetapan antara lain (1) Korban dan Kerugian yang ditimbulkan pasca terjadinya bencana alam Tsunami Aceh tahun 2004, (2) Kondisi Pelayanan Publik pasca terjadinya Tsunami Aceh pada tahun 2004, dan (3) Kondisi APBD Aceh. Kriteria tersebut yang menjadi dasar Pemerintahan SBY mengeluarkan keputusan Presiden tanggal 27 Desember tahun 2004 yang menyatakan bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami di wilayah Aceh sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2004 tentang Penetapan Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Bencana Nasional dan Hari Berkabung Nasional. Dari penetapan status bencana nasional tersebut Indonesia khususnya wilayah Aceh terbuka untuk menerima bantuan dari lembaga donor luar negeri.

Pemerintah SBY menetapkan beberapa fase penanggulangan bencana antara lain tahap Fase Tanggap Darurat, upaya rehabilitasi dan upaya rekonstruksi. Tahapan yang pertama, Fase Tanggap Darurat dilaksanakan 3 bulan pasca terjadinya peristiwa tsunami yaitu bulan Januari sampai Maret tahun 2005. Tahap Rehabilitasi dilakukan pada bulan April tahun 2005 hingga Desember tahun 2006. Tahap Rekonstruksi dilaksanakan setelah tahap tanggap darurat dilaksanakan dan bertepatan dilaksanakannya rehabilitasi yang dimulai pada Juli tahun 2005 hingga Desember tahun 2009. Dari ketiga fase itu Pemerintahan SBY bersama dengan lembaga donor membangun wilayah yang terkena dampak tsunami dari infrastruktur jalan, pelabuhan, kantor-kantor pelayanan publik serta pemulihan pelayanan publik beserta penanganan trauma para korban tsunami. Setelah ketiga tahapan dilakukan menjadikan penanganan yang sebelumnya tidak sistematis menjadi sistematis dan penanganan menjadi terstruktur dengan rancangan yang tepat sesuai aturan yang berlaku.

Terdapat beberapa hambatan dalam upaya penanganan peristiwa Tsunami Aceh tahun 2004 yaitu (1) ketidakpercayaan pihak asing terhadap BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi) dan (2) hambatan pada beberapa bidang antara lain, informasi, komunikasi, dan transportasi. Kedua hambatan tersebut diselesaikan dengan baik oleh Pemerintahan SBY. Hambatan pertama diselesaikan dengan membentuk SAK dan membentuk Convergence antar lembaga donor dan permasalahan kedua diselesaikan dengan perbaikan pengelolaan bantuan yang datang dari setiap lembaga donor dengan kemajuan berbagai sistem yang digunakan. Pemerintahan SBY dapat menyelesaikan 2 hambatan yang terjadi saat penanganan tsunami Aceh. Hal tersebut dapat dilakukan karena struktur koordinasi yang diatur secara matang dan tepat serta melalui berbagai pertimbangan Pemerintahan SBY maka dari itu hambatan dapat terselesaikan dan dapat berjalan baik proses rehabilitasi dan rekontruksi.

Untuk dampak terhadap Pemerintahan SBY. Penanganan peristiwa Tsunami Aceh tahun 2004 oleh Pemerintahan SBY memberikan dampak yang positif. Dampak yang diperoleh adalah semakin jelasnya sistem penanggulangan bencana alam di Indonesia dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan SBY pada saat penanganan tsunami Aceh. Dampak lain yang dihasilkan dari penanganan ini adalah dampak untuk rakyat Aceh sendiri. Keadaan pasca dilakukannya proses rehabilitasi dan rekontruksi oleh pemerintah. Salah satu yang menonjol adalah perekonomian Aceh yang menurun sehingga menyebabkan migrasi di wilayah Aceh semakin naik.

## 8.2 Saran

Berdasarkan simpulan dari penelitian penulis menyajikan beberapa saran yaitu,

### 1. Bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Pusat

Pembelajaran dari penanganan Tsunami Aceh dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah ataupun Pemerintahan Pusat untuk mitigasi bencana. Pertama, mengalokasikan sumberdaya untuk mitigasi risiko dan kesiapsiagaan bencana adalah investasi penting bagi sebuah negara. Buktinya, *Global Assesment Report on Disaster Risk Reduction*

menyebutkan bahwa estimasi satu dollar yang diinvestasikan untuk sistem peringatan dini bisa menghindari kerugian sebesar \$2-14. Pasca bencana yang terjadi di Aceh, sebuah sistem peringatan dini yang canggih telah dikembangkan dengan biaya lebih dari \$400 juta. Alat yang dikembangkan yaitu 101 alat pengukur ketinggian permukaan laut, 148 seismometer, dan 9 pelampung (Rogers & Tsirkunov, 2010: 3). Sistem Peringatan Dini Tsunami Samudera Hindia bisa mengirim peringatan kepada pusat kendali Tsunami di berbagai negara dalam waktu sepuluh menit sejak sebuah gempa terjadi. Selanjutnya, membangun koordinasi antar institusi dan mekanisme pendanaan. Di awal periode setelah Tsunami terjadi, situasi menjadi tantangan besar bagi institusi dan tata kelola pemerintah. Beruntung Pemerintah Indonesia segera membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan mandat yang kuat untuk menetapkan prioritas dan melakukan koordinasi. Tindakan ini tidak saja memastikan dana sesuai dengan kebutuhan, tapi juga sejalan dengan praktik global yang baik untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Terakhir perlunya menempatkan masyarakat sebagai pusat proses rekonstruksi bencana alam. Di Aceh, rekonstruksi dipimpin langsung oleh masyarakat melalui proses partisipatoris pemetaan risiko, perencanaan investasi lokal, serta rekonstruksi rumah yang ditentukan oleh pemiliknya. Proses pemberdayaan seperti ini membuat masyarakat bangkit kembali, dan dalam jangka panjang menjadi semakin kuat dan aman. Besarnya korban manusia dan kerusakan mengancam kemajuan ekonomi yang telah dicapai selama puluhan tahun. Dengan menempatkan masyarakat sebagai pusat perencanaan dan implementasi proses rekonstruksi, masyarakat merasa puas, punya rasa memiliki yang kuat dan dengan hasil yang bahkan lebih baik.

## 2. Bagi Almamater

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan sebagai bentuk perwujudan tugas Universitas Jember yaitu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurahman, D. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Abdullah, I. 2006. *Dialektika Natur, Kultur Dan Struktur: Analisis Konteks, Proses Dan Ranah Dalam Konstruksi Bencana, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Antropologi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Abidin. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Adji, A. 2011. *Social Economic Integration In Aceh: Prior-Post Tsunami*. Widyariset, Vol. 14 No.1. Pusbindiklat Peneliti LIPI.
- Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. 2014. *Indian Ocean Tsunami*.
- Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias. 2008. *Laporan Tahunan Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias*. Banda Aceh: Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD dan Nias.
- Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias. 2007. *Laporan Kegiatan Dua Tahun Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias*. Banda Aceh : Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD dan Nias.
- Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias. 2005. *Laporan Kegiatan Enam Bulan Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias*. Banda Aceh: Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD dan Nias.
- BRR. 2005. *Aceh dan Nias Satu Tahun Setelah Tsunami Upaya Pemulihan dan Kegiatan yang Akan Datang Banda Aceh [Aceh and Nias One Year After the Tsunami Recovery Effort and Upcoming Events at Banda Aceh ]*. Aceh.
- Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias. 2006. *Building a Land of Hope, One Year Report Executing Agency of the Rehabilitation and Reconstruction Agency for Aceh and Nias*. Banda Aceh: BRR NAD-Nias.

- BRR NAD dan Nias. 2005. *Konsep BRR Menuju Transparansi dan Akuntabilitas*. Banda Aceh: BRR NAD dan Nias.
- Badan Pusat Statistik. 2005. *Penduduk Aceh Pasca Gempa dan Tsunami; Hasil Sensus Penduduk Aceh Nias 2005*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2004. *Hasil Sensus Penduduk Aceh 2004*. Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2008. *Bab 34: Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias, Sumatra Utara, serta Daerah Pasca Bencana Lainnya*. Indonesia.
- BBC News. 2005. *Tsunami Aid: Who's giving what?*
- Budiarjo. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Cas, A., E. Frankenberg, W. Suriastini, D. Thomas. 2014. "The Impact of Parental Death on Child Well-Being." *Demography*. 51(2): 437-57.
- Dadek, T. 2017. *Tsunami Kasih; Catatan Peristiwa yang Disangka Kiamat*. Banda Aceh: Yayasan PeNA.
- Djalal, D. 2008. *Harus Bisa "Seni Memimpin Ala SBY"*. Jakarta: Red & White Publishing
- Dunn, W. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Duverger. 1998. *Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gottschalk, L. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. 1985. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Frankenberg, E., T. Gillespie, S. Preston, B. Sikoki, and D. Thomas. 2011. "Mortality, the Family, and the Indian Ocean Tsunami." *The Economic Journal*. 121 (August), F162-182.
- Frankenberg, E., J. Nobles, and C. Sumantri. 2012. "In the Wake of the Tsunami: Destruction of Community Revisited." *Journal of Health and Social Behavior*. December 2012 53(4):498-514.

- Frankenberg, E., T. Gillespie, S. Preston and D. 2008. Thomas Mortality, The Family and The Indian Ocean Tsunami. *The Economic Journal*. 121(554):162-162
- Tempo. 2004. Pemerintah Siapkan Tiga Tahap Pemulihan Aceh. Tempo.co
- Hambali. 2004. *Alat Transportasi Jadi Kendala Pemberian Bantuan*. Tempo.co.
- Haryadi. 2015. *Climate Changes Mitigation Policy of Forestry Sector for Middle Term Development Planning 2015-2019 in the Provinces of Papua and Aceh*. *Journal Politica* vol. 6 No. 2.
- Husin dan Alvisyahrin. 2014. *Peran Hukum Adat dalam Penanggulangan Bencana Gempa dan Tsunami Aceh No. 64, Th. XVI*.
- International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. 2005. *World Disaster Report: Focus on Information in Disaster*.
- ICRAF. 2012. *Membangun Kembali Aceh: Belajar dari Hasil Penelitian dan Program Rehabilitasi Aceh Pasca Tsunami*.
- Kartodirjo, S. 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kementrian Kesehatan RI. 2005. *Indonesia Berhasil Tangani Masalah Kesehatan Akibat Bencana Di Prov. NAD dan Sumut*.
- Kementrian Keuangan RI. 2008. *Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2008*.
- Liputan6. 2005. *Farid Faqih Menjadi Tersangka Tunggal*. Jakarta
- Matsumaru, Nagami, & Takeya. 2012. *Reconstruction of the Aceh Region Following the 2004 Indian Ocean Tsunami Disaster: a Transportation Perspective*. *IATSS Japan Research* vol 36 hal. 11–19.
- Maradi, dkk. *Peranan Australia Dalam Pembangunan Aceh Pasca Bencana Tsunami Melalui Kerangka Kerjasama AIPRD (Australia Indonesia Partnership For Reconstruction And Development Periode 2005-2009)*. FISIP Universitas Udayana.
- Mahdi, S. 2007. *Where do IDPs Go? Evidence of Social Capital from Aceh Conflict and Tsunami IDPs*.

- Multi Donor Fund. 2011. *Kemitraan untuk Mencapai Keberlanjutan*. Jakarta.
- Moerdopo, E. 2009. *Terapi Tari Sebagai Salah Satu Metode Intervensi Sosial dalam Proses Pemulihan Trauma Pasca Bencana*.
- Nazamuddin. 2007. *Kebijakan Ekonomi Untuk Mitigasi Bencana Dan Pemulihan Pascabencana : Pelajaran Dari Bencana Tsunami Di Aceh*. Palembang. LIPI.
- Nugroho, S. 2017. *The Easerum Epicentre Pusat Studi Gempa Bumi Di Kabupaten Bantul, Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Priharnowo, T. 2005. *Kredit perbankan macetkan pembangunan di Aceh*. Tempo.
- Rogers, etc. 2010. *Global Assesment Report on Disaster Risk Reduction: Cost and Benefits of Early Warning System*. ISDR WorldBank.
- Roby. 2015. *RBI: Risiko Bencana Indonesia*. Jakarta: BNPB Press.
- Sjamsudin, H. 2007. *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
- Subiyantoro, E. 2004. *Laporan Investigasi Kondisi Perempuan dan Anak-anak*.
- Suwandono, etc. 2005. *Akibat Bencana Tsunami Terhadap Pelayanan Kesehatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD): Suatu Kajian Cepat Guna Masukan Bagi Kebijakan*. Jakarta: Media of Health Research & Development.
- Sisira & McCawley. 2010. *The Asian Tsunami: Aid and Reconstruction After a Disaster*. UK: Edward Elgar Publishing Limited.
- Swiss Agency for Development and Cooperation. 2009. *Switzerland's Commitment in Indonesia Following the Tsunami*.
- Tempo. 2004. *SBY, Tsunami dan Kedamaian di Aceh*.
- Thomas. 2008. "Mental Health in Sumatra after the Tsunami." *American Journal of Public Health*.98 (9): 1671-1677.
- Universitas Jember. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Press.

U.S. Agency for International Development. 2005. *Bureau for Legislative and Public Affairs: Tsunami Relief*.

World Bank. 2008. *Dampak Konflik, Tsunami, dan Rekonstruksi Terhadap Kemiskinan di Aceh*.

World Bank. 2006. *Indonesia: Preliminary Damage and Loss Assessment*.

WHO. 2005. *Health Aspects of the Tsunami Disaster in Indonesia December 26th, 2004*.

Yayasan Pulih & JICA. 2006. *Bersama Meraih Asa*. Jakarta: Pusat Krisis Psikologi Universitas Indonesia.

*Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

*Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2004 Tentang Penetapan Bencana Alam Gempa Bumi Dan Gelombang Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Provinsi Sumatera Utara Sebagai Bencana Nasional Dan Hari Berkabung Nasional*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

*Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kegiatan Tanggap Darurat Dan Perencanaan Serta Persiapan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi Dan Gelombang Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Provinsi Sumatera Utara*. Jakarta : Presiden Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi Dan Rekontruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat NAD Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara*. Jakarta : Presiden Republik Indonesia.

*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana*. Jakarta : Presiden Republik Indonesia.

*Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana*. Jakarta: Kepala BNPB.

## LAMPIRAN 1. MATRIK PENELITIAN

<b>Tema Penelitian</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Jenis dan Sifat Penelitian</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Metode Penelitian</b>
Sejarah Sosial	Kebijakan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Penanganan Peristiwa Tsunami Aceh Tahun 2004	1. Jenis Penelitian: Penelitian Sejarah 2. Sifat penelitian: Penelitian Pustaka literatur	1. Bagaimana latar belakang Tsunami Aceh tahun 2004 ditetapkan menjadi Bencana Nasional? 2. Bagaimanakah upaya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam menangani Tsunami Aceh pada tahun 2004? 3. Apakah hambatan yang dihadapi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam penyelesaian Tsunami Aceh tahun 2004? 4. Bagaimanakah dampak penanganan Tsunami Aceh pada tahun 2004 terhadap Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan rakyat Aceh?	1. Undang-undang, Keputusan, dan Instruksi Presiden; 2. UPT Perpustakaan Universitas Jember; 3. Koleksi Pribadi, 4. Internet	Metode penelitian Sejarah dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Heuristik 2. Kritik 3. Interpretasi 4. Historiografi

**LAMPIRAN 2. PETA WILAYAH YANG TERKENA BENCANA ALAM  
TSUNAMI PADA TAHUN 2004**



**Keterangan :**

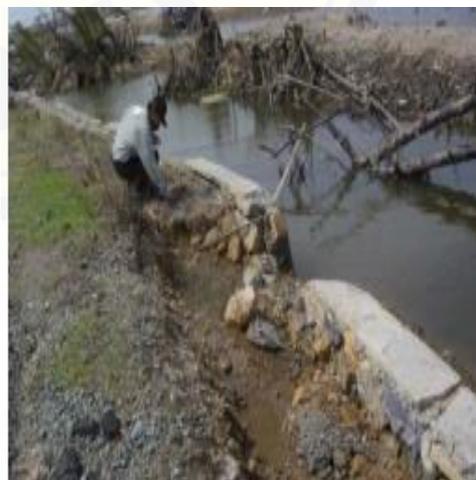
- : Wilayah yang terkena bencana alam Tsunami
- : Kantor Regional wilayah

Sumber : Laporan bersama BRR dan mitra internasional, Desember 2005

**LAMPIRAN 3. GAMBAR-GAMBAR KERUSAKAN PASCA TSUNAMI  
ACEH PADA TAHUN 2004**









Sumber: Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Aceh – ITB, 2005